

SKRIPSI

PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK PEMBANGUNAN GAMPONG DI KECAMATAN MANGGENG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA



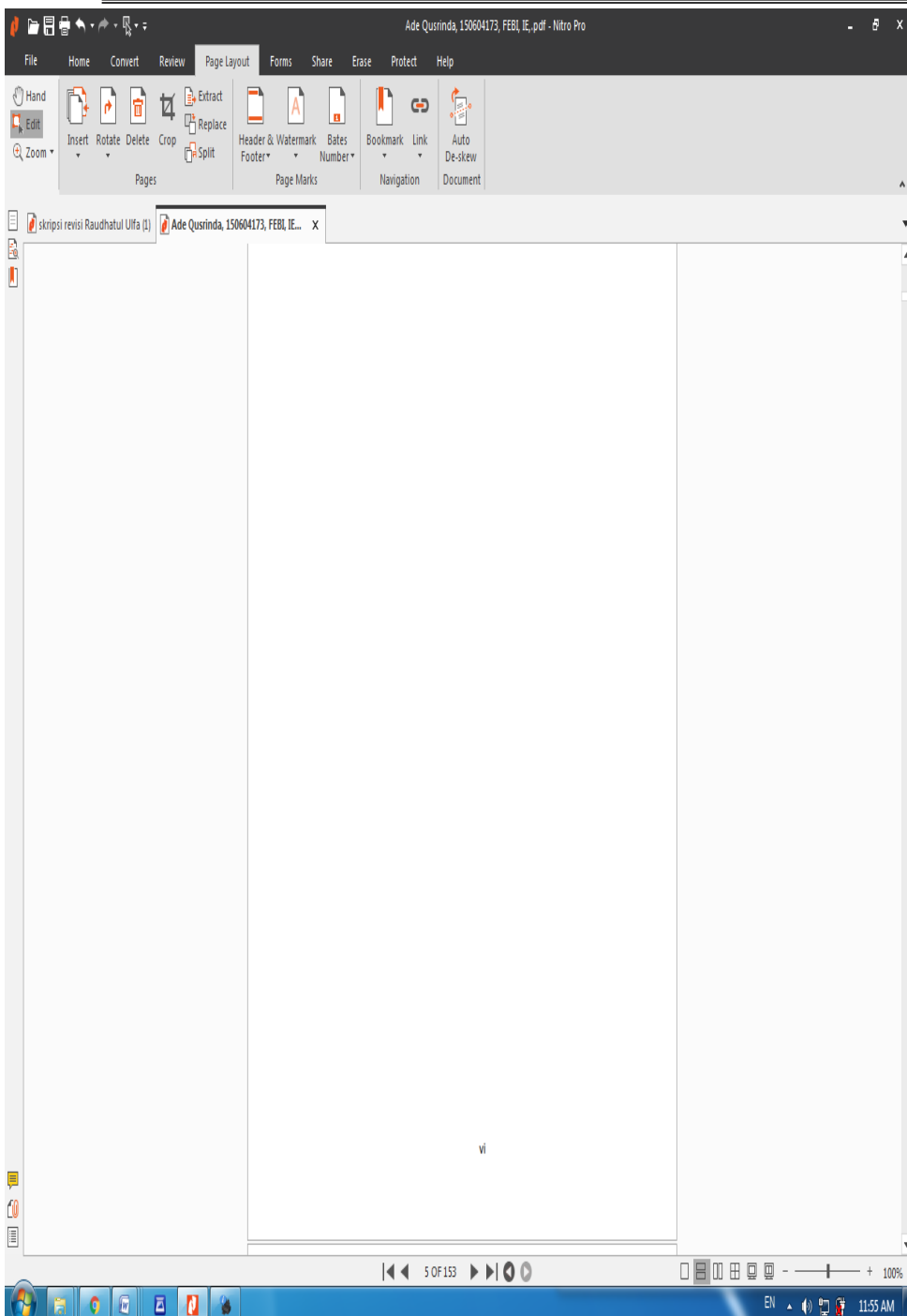
Disusun Oleh:

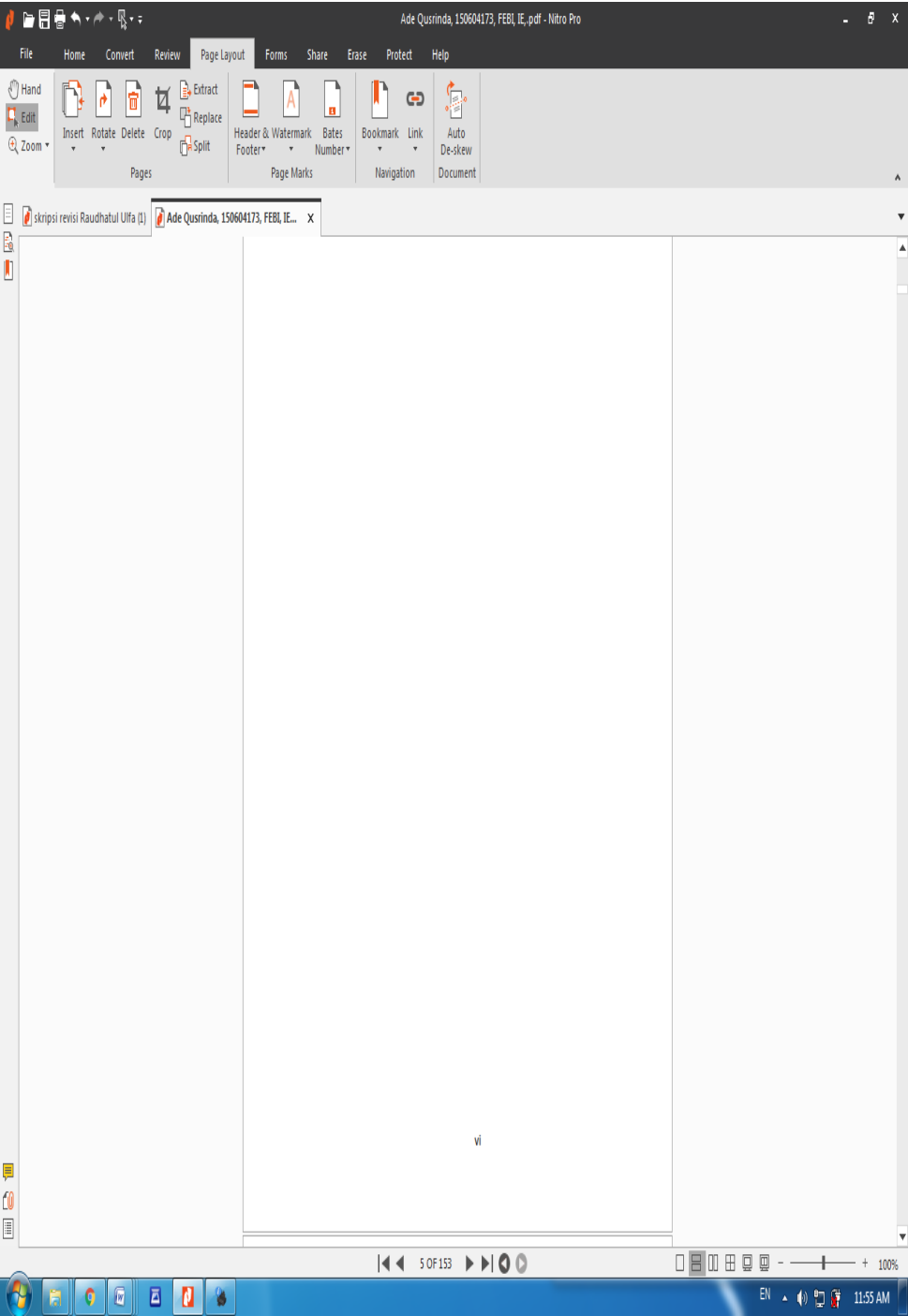
**ADE QUSRINDA
NIM. 150604173**

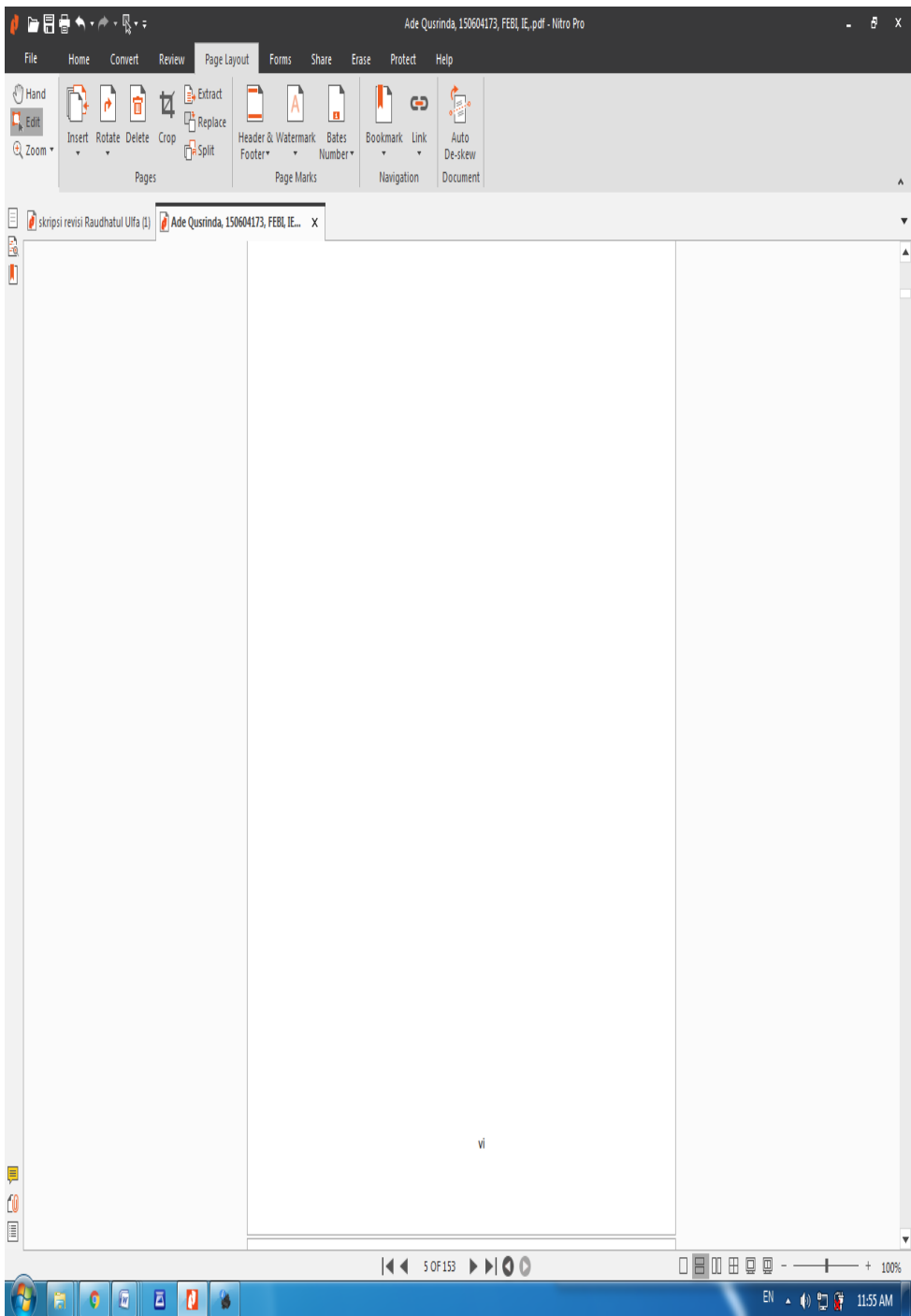
**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021M/1442 H**

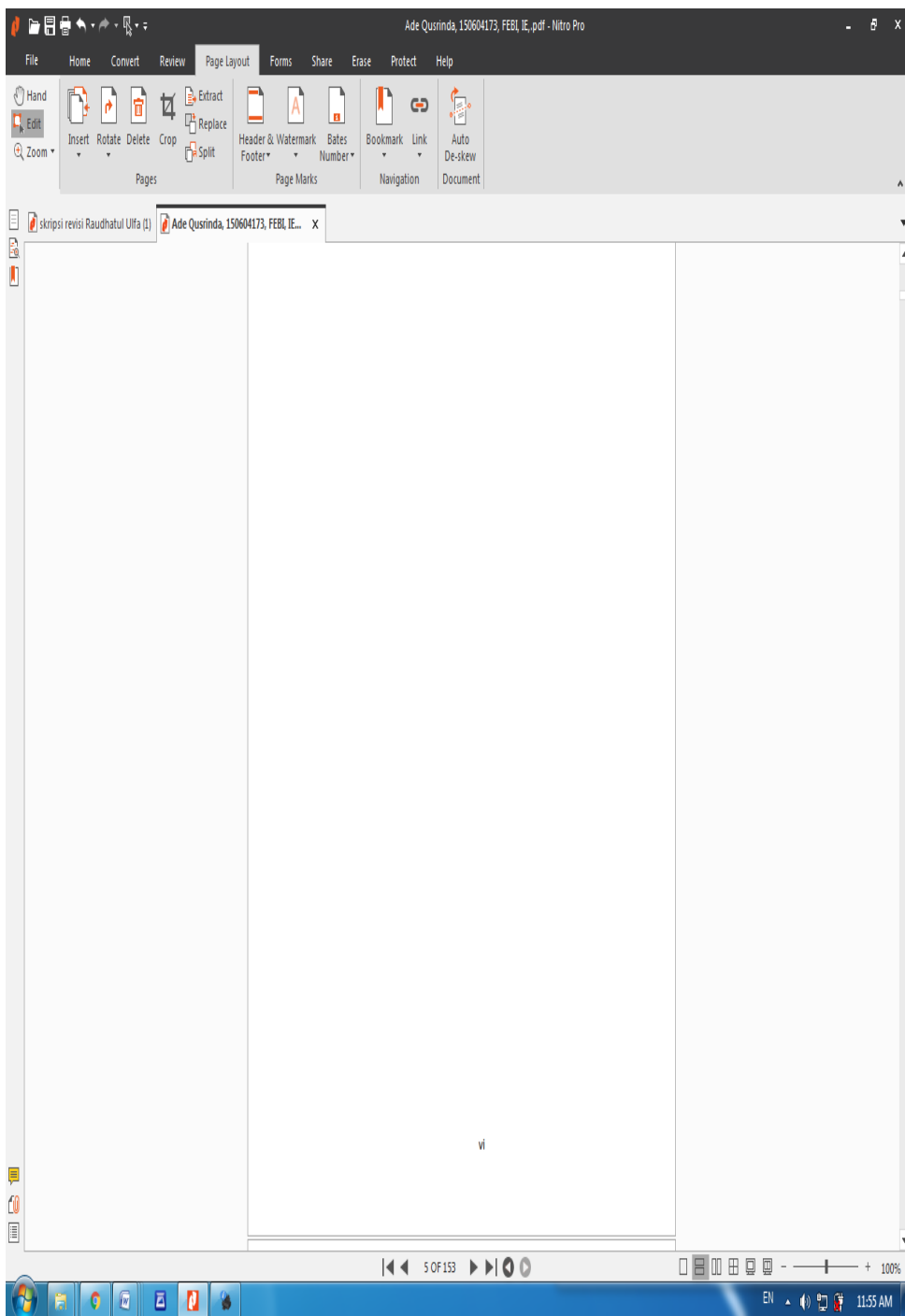


**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis









KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pembangunan Gampong di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya”**. Shalawat beriringkan salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. dimana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang sedang kita rasakan saat ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku Ketua Program studi Ilmu Ekonomi dan Marwiyati, SE., MM. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi dan ibu Sitti Zahrah, S.Ag selaku operator Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku dosen pembimbing I dan Tajul Ula, SE., M.Si selaku dosen Pembimbing II yang tidak bosan-bosannya memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas bimbingan dan motivasi selama ini.
5. Dr. Idaryani, SE., M.Si selaku penguji I dan Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si selaku penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses sidang berlangsung.
6. Dr. Muhammad Adnan, SE selaku penasehat Akademik (PA) yang telah memberi saran dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibunda Ayahnda, Abang dan Keluarga tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, waktu dan do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga.
8. Sahabat-sahabat Mutia Sari dan Maria Ulfah dimana telah memberikan dukungan besar serta semangat yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Ekonomi 2015 yang telah memberikan sumbangan pikiran dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran atau ide-ide yang bersifat membangun dan bermanfaat dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 10 Januari 2021
Penulis,

Ade Qusrinda

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَقُولُ :yaqūlu

4. TaMarbutoh (ة)

Transliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- a. Ta *marbutoh* (ة) hidup

Ta *marbutoh* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutoh* (ة) mati

Ta *marbutoh* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutoh* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa/I : Ade Qusrinda
NIM : 150604173
Fakultas/Program Studi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Ilmu
Ekonomi
Judul Skripsi : Persepsi dan Partisipasi Masyarakat
terhadap Pemanfaatan Alokasi Dana
Desa (ADD) untuk Pembangunan
Gampong di Kecamatan Manggeng
Kabupaten Aceh Barat Daya
Pembimbing 1 : Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
Pembimbing II : Tajul Ula, SE., M.Si,

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di provinsi Aceh periode tahun 2013-2017. Model penelitian yang digunakan adalah model regresi data panel. Dari hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selanjutnya, dari hasil pengujian secara silmultan diperoleh hasil bahwa variabel jumlah penduduk, pengangguran

**Kata Kunci : Persepsi, Partisipasi dan Pembangunan
Gampong (Desa)**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	iii
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	vi
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG.....	vii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	viii
KATA PENGANTAR	x
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx

BAB I.PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II. KAJIAN TEORITIS	
2.1 Pengertian Kebijakan.....	17
2.1.1 Implementasi	18
2.1.2 Implementasi Kebijakan.....	21
2.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan.....	26
2.2 Dana Pembangunan	27
2.2.1 Dana Alokasi Umum (DAU)	28
2.2.2 Dana Alokasi Khusus (DAK)	30
2.2.3 Dana Bagi Hasil (DBH).....	31
2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	33
2.4 Pengertian Alokasi Dana Desa (PAD).....	36
2.4.1 Kebijakan Alokasi Dana Desa.....	37
2.4.2 Perencanaan Pembangunan Desa	39

2.4.3 Tujuan Alokasi Dana Desa	40
2.5 Pembangunan Desa.....	41
2.6 Persepsi Masyarakat	41
2.7 Pengaruh Persepsi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa.....	42
2.8 Partisipasi Masyarakat	42
2.9 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa.....	43
2.10 Indikator dari Sisi Pemerintah Keberhasilan pembangunan Desa	45
2.11 Penelitian Sebelumnya	46
2.12 Kerangka Pemikiran.....	52
2.13 Pengembangan Hipotesis	53

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	55
3.2 Pendekatan Penelitian.....	55
3.3 Lokasi Penelitian.....	55
3.4 Data dan Teknik Pengumpulan Data	56
3.4.1 Jenis Data.....	56
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data	56
3.4.3 Populasi dan Sampel.....	56
3.4.4 Teknik Pengumpulan Sampel.....	57
3.4.5 Skala Pengukuran	59
3.5 Teknik Analisi Data	59
3.5.1 Uji Validitas.....	59
3.5.2 Uji Reliabilitas.....	60
3.6 Operasional Variabel Penelitian	60
3.6.1 Uji Normalitas	61
3.6.2 Uji Multikolinearitas.....	61
3.6.3 Uji Heteroskedastisitas	64
3.7 Metode Analisis	64
3.7.1 Regresi Linear Berganda	65
3.8 Pengujian Hipotesis	66
3.8.1 Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t) .	66
3.8.2 Uji Signifikasi simultan (Uji F)	67
3.8.3 Koefisien Determinasi (R ²).....	68

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	70
4.2	Karakteristik Responden	71
4.3	Tanggapan Responden	72
4.3.1	Tanggapan Responden terhadap Persepsi Masyarakat (X1)	72
4.3.2	Tanggapan Responden terhadap Partisipasi Masyarakat (X2).....	74
4.3.3	Tanggapan Responden terhadap Pembangunan Desa (Y)	75
4.4	Hasil Metode Analisis Data.....	76
4.4.1	Hasil Uji Valilitas	76
4.4.2	Hasil Uji Realibilitas	77
4.5	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	78
4.5.1	Hasil Uji Normalitas.....	78
4.5.2	Hasil Uji Multikolinearitas.....	79
4.5.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	80
4.6	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	81
4.7	Hasil Uji Hipotesis	83
4.7.1	Hasil Uji T (Persial).....	83
4.7.2	Hasil Uji F (simultan)	85
4.7.3	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	86
4.8	Pembahasan Hasil Penelitian.....	86
4.8.1	Pengaruh Persepsi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa.....	86
4.8.2	Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa.....	87

BAB V. PENUTUP

5.1	Kesimpulan	89
5.2	Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Data PDRB menurut pengeluaran Aceh Barat Daya tahun 2016-2019	12
Tabel 2.1	: Penelitian Sebelumnya	47
Tabel 3.1	: Ukuran dan Penilaian	59
Tabel 3.2	: Operasional Variabel Penelitian.....	62
Tabel 4.1	: Karakteristik Responden	71
Tabel 4.2	: Tanggapan Responden terhadap Persepsi Masyarakat	72
Tabel 4.3	: Tanggapan Responden terhadap Persepsi Masyarakat	74
Tabel 4.4	: Tanggapan Responden terhadap Persepsi Masyarakat	75
Tabel 4.5	: Hasil Uji Validitas	76
Tabel 4.6	: Hasil Uji Reliabilita.....	78
Tabel 4.7	: Hasil Uji Multikolinearitas.....	80
Tabel 4.8	: Hasil Uji Regresi Linier Berganda	82
Tabel 4.9	: Hasil Uji T (Parsial).....	83
Tabel 4.10	: Hasil Uji F	85
Tabel 4.11	: Hasil R Square.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Jumlah Total Alokasi Dana Desa Nasional Tahun 2016-2019	9
Gambar 1.2	Grafik Jumlah Total Alokasi Dana Desa Provinsi Aceh Tahun 2016-2019.....	10
Gambar 1.3	Grafik Jumlah Total Alokasi Dana Desa Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016-2019..	11
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner	95
Lampiran 2	Data Responden.....	99
Lampiran 3	Hasil Uji	111
Lampiran 4	Titik Persentase Distribusi t ($df = 1 - 100$)	119
Lampiran 5	Tabel F.....	124
Lampiran 6	Tabel R	129

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pembangunan Desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pembangunan desa ada beberapa tahapan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan beberapa unsur seperti Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam mencapai pembangunan desa. (Sofiyanto, Mardani, & Salim, 2017)

Pembangunan desa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan Desa. Sebagai implikasi dari penyelenggaraan pembangunan tersebut, tentu saja akan membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan Desa. (Karimah, Saleh,, & Wanusmawatie, 2014) Negara kesatuan Republik Indonesia telah mengatur keberadaan Desa dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi melalui Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa. Desa menurut UU nomor 6 Tahun 2004 dalam (Kholik, 2017) memiliki arti sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut di atas mengandung makna bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah Desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di Desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat Desa.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah Desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di setiap Desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya. Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. (Kholik, 2017)

Menurut Rozaki dkk (2005) sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintahan dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintahan Kabupaten yang semula dominan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi. (Karimah, Saleh,, & Wanusmawatie, 2014)

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari keuangan Desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa.

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11 disebutkan: Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Menurut Wida (2016) pelaksanaan Pembangunan Desa Harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya Pembangunan Desa. (Ruru, Kalangi, & S. Budiarmo, 2017)

Alokasi Dana Desa adalah dana yang berumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan Perolehan bagian keuangan Dsa dari Kabupaten yang penyalruannya melalui kas Desa. (Ni Kadek Darmiasih, et al. 2015) (Ruru, Kalangi, & S. Budiarmo, 2017)

Pengelolaan Alokasi Dana Desa selayaknya dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang tidak mengorbankan kepentingan publik. Hal ini akan mendorong pemerintah daerah untuk benar-benar mengembangkan strategi pembangunan daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya. (Kholik, 2017) Peraturan pemerintah tentang desa No. 43 Tahun 2014, merupakan masa transisi dan memberikan dasar menuju *development community* yakni bahwa desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi *independent community* sehingga setiap warga desa dan masyarakat pada dasarnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri. (Ahmad & Darmiah, 2016)

Pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam peraturan perundangan tersebut, adalah pencerminan proses demokratisasi dalam pelaksanaan otonomi desa untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa dengan titik berat kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan otonomi yang luas dan nyata tersebut bukan merupakan kelanjutan. Keadaan yang faktual empiris, merupakan kesinambungan dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi yang tersirat dalam undang-undang tersebut adalah: mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak desa; peningkatan pendapatan asli desa dan pengurangan subsidi dari pusat; mendorong pembangunan desa sesuai dengan aspirasi masing-masing desa. (Ash-shidiqq & Wibi, 2018) Dalam

pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah desa sangat berperan. Dimana pemerintah desa dituntut untuk memaksimalkan penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa agar dapat terwujud pembangunan di desa baik dalam hal infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan juga dalam hal lainnya.

Pemerintah desa merupakan unsur penyelenggara pemerintah yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa yang terdiri atas kepala-kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Untuk mengatur dan mengurus urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa yang disusun oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Karimah, Saleh,, & Wanusmawatie, 2014)

Pemimpin dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Kemampuan dan keterampilan dalam pengarahan adalah faktor penting efektifitas suatu organisasi. Bila organisasi dapat mengidentifikasi kualitas-kualitas yang berhubungan dengan kepemimpinan, kemampuan untuk menyeleksi pemimpin-pemimpin yang efektif akan meningkat, dan apabila organisasi dapat mengidentifikasi perilaku dan teknik tersebut akan dapat dipelajari.

Pada sebuah organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, dipengaruhi

oleh kepemimpinan, melalui kepemimpinan dan didukung oleh pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi di Indonesia. Mengenai pembangunan desa dengan adanya perubahan struktur masyarakat, maka dengan dipertegasnya desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan sosial budaya masyarakat berarti memberikan peluang untuk tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya dengan pemahaman seperti ini, maka posisi desa yang memiliki otonomi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. (Ahmad & Darmiah, 2016)

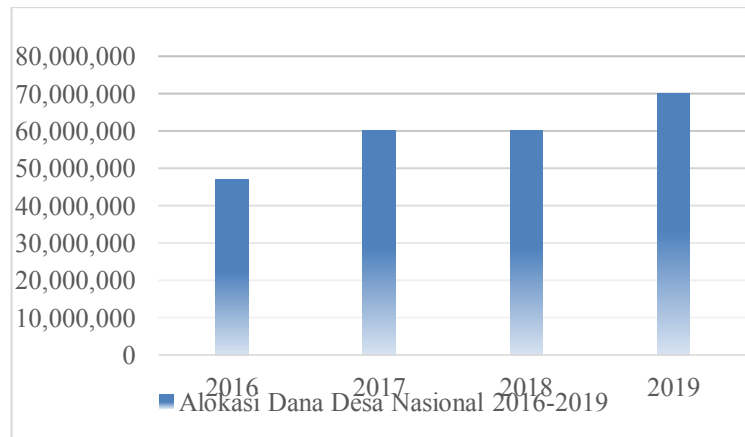
Untuk mewujudkan tujuan peraturan perundangan tersebut, dana transfer haruslah dikelola dengan tahapan yang sesuai Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut, Bab V peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa:

- 1) Perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk APBDesa berdasarkan RPJMDesa dan RKDesa tahun berkenaan disusun oleh Sekretaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk sepakat bersama dalam musyawarah yang melibatkan masyarakat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa yang harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Serta pelaksanaan kegiatan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang mengharuskan mengajukan Surat Permintaan Pemabayaran.
- 3) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa
- 4) Pelaporan pelaksanaan APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari bulan berikutnya.
- 5) Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan

melampirkan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, format Laporan Kekayaan ilik Desa dan format Laporan Pmerintahan dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa yang harus diinformasikan kepada masyaraat secara tertulis dan dengan media nformasi. (Tikollah & A. Ngampo, 2018)

Berdasarkan dari pembahasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pemanfaatan Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan Gampong di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya”. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini karena sekarang pemerintah Pusat telah melakukan kebijakan kepada daerah-daerah seluruh Indonesia untuk mengelola keuangan secara mandiri. Itu semua ditujukan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu pemerintah juga bertujuan meminimalisir ketimpangan antar daerah atau agar terjadinya pemerataan ekonomi. Selanjutnya bagaimana Pemerintah Daerah dan Desa mengalokasikan semua anggaran yang telah di transfer oleh pemerintah Pusat. Apakah berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi dari semua keijakan yang dilaksanakan atau malah sebaliknya.

Transfer Alokasi Dana Desa Nasional sepanjang tahun 2016 sampai 2019 mengalami fluktuasi, hal ini dapat dilihat seperti pada gambar 1.1 berikut.



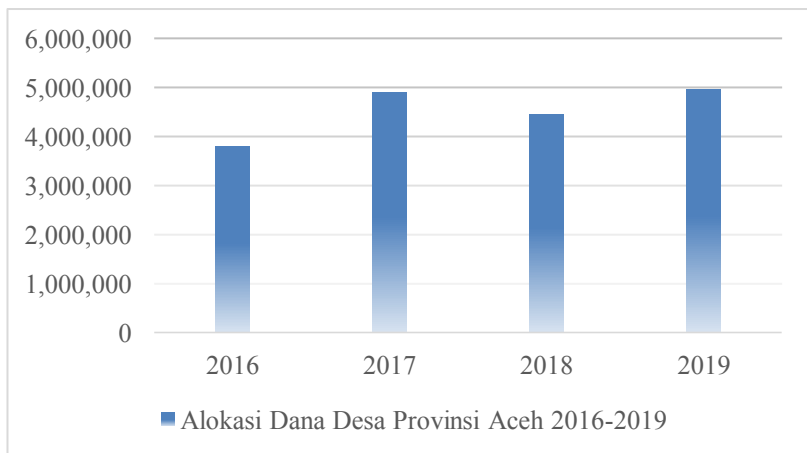
Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019) dalam juta Rupiah

Gambar 1.1
Grafik Total Jumlah Dana Desa Nasional tahun 2016-2019

Berdasarkan grafik 1.1 dari tahun 2016-2017 pembiayaan Alokasi Dana Desa ditingkat nasional mengalami peningkatan. Kemudian pada tahun 2017-2018 pembiayaan Alokasi Dana Desa berjumlah sama tidak mengalami peningkatan atau penurunan. Peningkatan kemudian terjadi pada tahun 2018-2019. Setiap tahunnya, pemerintah menargetkan alokasi dana desa selalu meningkat. Adapun realisasi dana desa sejak diimplementasikan pada tahun 2016 Rp 46,7 triliun atau 99,4% dari target APBN 2016. Pada 2017, realisasi dana desa sebesar Rp 59,8 triliun atau 99,6% dari target APBN 2017. Tahun lalu realisasi dana desa mencapai Rp 59,9 triliun atau 99,77% dari target APBN 2018.

Realisasi dana desa hingga Agustus 2019 telah mencapai Rp 42,2 triliun atau 60,29% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang sebesar Rp 70 triliun. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, realisasi dana desa terhadap APBN 2019 lebih rendah daripada periode sebelumnya yang sebesar Rp 36,2 triliun atau 60,41% dari target APBN 2018 Rp 60 triliun. (Jayani, 2019)

Jumlah Alokasi Dana Desa Provinsi sepanjang tahun 2016 sampai 2019 juga mengalami fluktuasi, hal ini dapat dilihat seperti pada gambar 1.2 berikut.



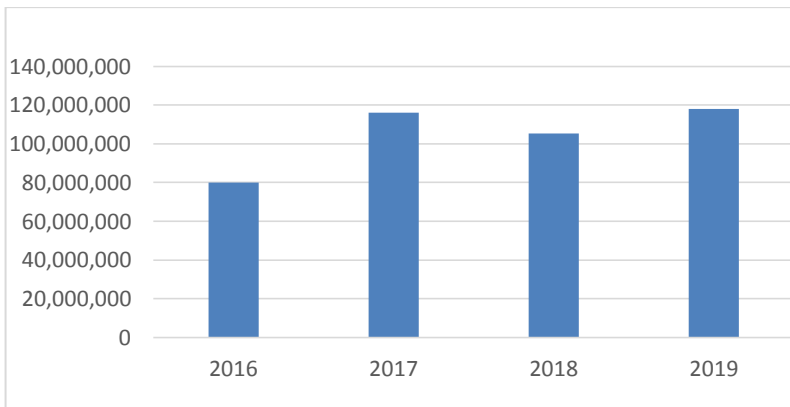
Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019) dalam juta Rupiah

Gambar 1.2
Grafik Total jumlah Dana Desa Provinsi Aceh Tahun 2016-2019

Dari grafik di atas pembiayaan Alokasi Dana Desa di tingkat Provinsi Aceh mengalami naik turun dari tahun 2016-2019. dari tahun 2016 ke 2017 pembiayaan Alokasi Dana Desa meningkat. Pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan. Kemudian pada

tahun 2018-2019 kembali mengalami peningkatan. Ini disebabkan realisasi Alokasi Dana Desa yang di transfer ke tiap-tiap Provinsi di seluruh Indonesia, yang setiap tahunnya berbeda-beda.

Perkembangan transfer Alokasi Dana Desa Kabupaten Aceh Barat Daya sepanjang tahun 2016 sampai 2019 mengalami fluktuasi, hal ini dapat dilihat seperti pada gambar 1.3 berikut



Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019) dalam ribu Rupiah

Gambar 1.3
Grafik Total jumlah Dana Desa Kabupaten Aceh Barat Daya
tahun 2016-2019

Dari grafik di atas pembiayaan Alokasi Dana Desa di tingkat Provinsi Aceh mengalami naik turun dari tahun 2016-2019. dari tahun 2016 ke 2017 pembiayaan Alokasi Dana Desa meningkat. Pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2018-2019 kembali mengalami peningkatan. Ini terjadi karena realisasi Alokasi Dana Desa yang dilakukan pemerintah ke Pemerintah Provinsi, kemudian Pemerintah Provinsi membagikan

ke tiap-tiap Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh yang pada setiap tahunnya juga berbeda-beda.

Alokasi Dana Desa adalah salah satu dari sekian kebijakan pemerintah dalam upaya memperbaiki atau meningkatkan ekonomi masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Aceh Barat Daya mengalami naik turun. Hal ini dapat kita lihat pada table 1.1 yaitu data PDRB menurut pengeluaran KAbupaten Aceh Barat Daya Tahun2016-2019. Dalam hal ini pemerintah tidak bisa berperan sendiri dalam artian masyarakat harus ikut membantu. Penelitian ini dibuat agar mengetahui bagaimana pengaruh persepsi masyarakat dan persepsi masyarakat terkait dengan kebijakan Alokasi Dana Desa. Selanjutnya penelitian ini bertujuan agar bisa menjadi edukasi atau pengetahuan bagi masyarakat bahwa persepsi atau partisipasi masyarakat mempengaruhi kesuksesan dari progam pemerintah terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) atau malah sebaliknya.

**Tabel 1.1 Data PDRB
menurut pengeluaran Aceh Barat Daya tahun 2016-2019**

NO	Tahun	PDRB (%)
1	2016	4.56
2	2017	4.46
3	2018	4.61
4	2019	4.74

Sumber : BPS Aceh Barat Daya 2020

1.2 Rumusan masalah.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaruh persepsi masyarakat tentang implementasi kebijakan Dana Desa mempengaruhi pembangunan Desa di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya?
- 2) Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat tentang Dana Desa mempengaruhi pembangunan Desa di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya?

1.3 Tujuan penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian di atas maka tujuan peneliti melakukan penelitian tersebut adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh persepsi masyarakat tentang implementasi Dana Desa di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya
- 2) Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat tentang Dana Desa di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan serta dapat memperluas wawasan khususnya tentang persepsi dan partisipasi masyarakat

terhadap implementasi alokasi dana desa untuk pembangunan gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kegunaan penelitian yang bersifat praktis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti, menambah pengetahuan dan informasi tentang persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap implementasi alokasi dana desa untuk pembangunan gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Bagi Pemerintah Daerah Aceh Barat Daya Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan pengambil kebijakan dalam memaksimalkan pengalokasian dana desa.

Bagi akademik, hasil penelitian ini dapat menambah literatur kepustakaan yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian lebih lanjut khususnya yang berhubungan dengan tentang studi implementasi alokasi dana desa.

Bagi masyarakat umum hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai tentang persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap implementasi alokasi dana desa untuk pembangunan gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Bagi penelitian yang akan datang hasil penelitian ini sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa dimasa mendatang.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)

untuk Pembangunan Gampong di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, maka terdapat sistematika pembahasan yang terdiri dari bab I hingga bab V.

Pada bab I membahas penelitian yang dimulai dari latar belakang yang menjelaskan peta masalah yang akan diteliti, dan kemudian terdapat rumusan masalah yang merupakan problem atau masalah yang akan dibuat dan kemudian terdapatnya tujuan penelitian yang menjelaskan tentang suatu hal yang akan di capai dalam melakukan penelitian serta terdapat manfaat penelitian yang menjelaskan tentang manfaat penelitian yang akan di peroleh dari penelitian tersebut. Serta terdapat sistematika pembahasan yang menjelaskan bagian-bagian penulisan skripsi pada setiap babnya.

Kemudian pada bab II terdapat teori yang relevan pada topik yang akan dibahas, kemudian terdapatnya temuan penelitian terkait serta model penelitian atau kerangka berfikir. Dan bagian terakhir pada bab II terdapatnya pengembangan hipotesis yang berupaya untuk merumuskan hipotesis dengan argument yang dibangun dari teori atau logika dan penelitian sebelumnya yang relevan.

Pada bab III secara umum penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian seperti penjelasan tentang jenis penelitian yang akan dilakukan. Data dan tehnik memperolehnya, Teknik pengumpulan data, skala pengukuran dan beberapa bagian lainnya

Kemudian pada bab IV, memuat deskripsi obyek penelitian hasil serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya

Dan pada bab V merupakan bab penutup dari pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Kebijakan

kebijakan (*policy*) merupakan suatu program kegiatan yang dipilih atau diputuskan oleh seseorang atau kelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kemudian menurut Freidrich dalam Islamy (1997) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan untuk mencapai tujuan. (Magdalena, Kusuma, & Utomo, 2013) Anderson (2006) kebijakan dapat diartikan sebagai Tindakan yang didesain secara sengaja yang relatif stabil yang dilakukan oleh aktor sebagai Tindakan yang didesain yang relatif stabil yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah atau hal-hal yang menjadi perhatian bersama.

Istilah kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai “pedoman untuk bertindak”. Kebijakan dalam maknanya seperti ini bisa berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah Tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana. Dengan kata lain kebijakan juga dapat merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan acuan, pedoman, pegangan dan petunjuk serta cara bagi

setiap usaha dan kegiatan sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (Sabdaningtyas, 2018)

Menurut Titmuss (1997) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur Tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu dan menurut Edi Suharto (2008) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (John P, 2015)

Kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahanapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

2.1.1 Implementasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Artinya segala sesuatu yang telah dilaksanakan dan ditetapkan semua telah diatur atau dirancang untuk sepenuhnya dijalankan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Kata implementasi (*implementation*) berasal dari kata dasar *verb implement*, menurut kamus Oxford-advanced Learner's

Dictionary (1995) bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to put something into effect* (mengarahkan sesuatu untuk menimbulkan dampak/akibat); *to carry something out* (melaksanakan sesuatu). Dengan demikian implementasi menurut arti kata harfiah adalah pelaksanaan sesuatu, sehingga implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan suatu kebijakan (keputusan, perda ataupun undang-undang lainnya). (Aziz & Humaizi, 2013)

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Irfan M Islamy untuk mengefektifkan implementasi kebijakan diperlukan tahap-tahap implementasi kebijakan. Tahap implementasi dibagi dua bentuk, yaitu :

- 1) Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya. Misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
- 2) Bersifat *non self-executing*, yang berarti bahwa suatu kebijakan public perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai. (uli Simarmata, 2015)

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995) dan Wibawa, dkk., (1994) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. (Akib, 2010)

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier (1983) merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Winarno (2002) mengemukakan bahwa suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatancatatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan". (Permana, 2012)

Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Wahab (2008) menjelaskan makna implementasi adalah Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula dalam bentuk perintah-perintah atau keputusan-

keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin di capai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan-tahapan tertentu, biasanya diawali dengan ahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok sasaran, dampak nyata baik dikehendaki atau tidak-dari output tersebut dampaknya sebagian dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan dan akhirnya perbaikan-perbaikan yang penting atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap undang-peraturan yang bersangkutan. (Ashari, 2013)

2.1.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakooan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Kamus Webster dalam (Wahab 1997) mengartikan implementasi sebagai “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effects to* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu)”. Implementasi berarti

menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu. (Hasman, 2015)

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti direncanakan. Untuk dapat mewujudkan output dan outcomes yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan tanpa diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit sebagaimana dipertegas oleh Udoji yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. (Ahmad & Darmiah, 2016)

Menurut Nugroho (2004) implementasi kebijakan dapat dijelaskan :

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan

derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. (Sanusi, Paranoan, & Djumlani, 2014)

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dalam keseluruhan proses kebijakan yaitu tahap formulasi, tahap implementasi, dan tahap evaluasi yang berlangsung dalam suatu sistem kebijakan yang kompleks dan dinamik serta akan menentukan berhasil atau gagalnya suatu kebijakan. Oleh karena itu implementasi kebijakan adalah merupakan suatu tahapan penting dalam proses kebijakan untuk dikaji agar bisa mengantisipasi terhadap keberhasilan kebijakan itu sendiri. Definisi sederhana dari istilah implementasi adalah “penerapan atau pelaksanaan”. Implementasi kebijakan bersifat interaktif dengan kegiatan kebijakan yang mendahuluinya yakni formulasi kebijakan. Oleh karena itu implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai sebuah proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang harus dilakukan. (Sabdaningtyas, 2018)

Pemahaman lebih lanjut tentang konsep implementasi menurut Putra (2004) yang memberi pernyataan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu, dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak aktual. (Annivelorita, 2015)

Implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. George C Edward III (1980) dalam Subarsono (2005) memberikan pandangan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). (Permana, 2012)

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan Elmore sebagaimana dikutip Sunggono (1994), didefinisikan sebagai “keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan”. Sementara Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Wibawa dkk, (1986) menjelaskan bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. (Magdalena, Kusuma, & Utomo, 2013)

Dunn (2000) mengartikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan sampai di capainya hasil kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan aktivitas praktis yang di bedakan dari formulasi kebijakan yang pada dasarnya bersifat teoritis”. Menurut Jones dan Widodo (2001) merumuskan batasan implementasi sebagai “*a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done*”. Dalam hal ini implementasi merupakan proses mendapatkan sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus di kerjakan. (Ashari, 2013)

James Anderson (1979) dalam jurnal (Natalia, Mardiyono, & Said 2014) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”. Konsep ini menjelaskan bahwa apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam hal ini pemerintah untuk suatu permasalahan. (Djiko dkk, 2018)

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan memerlukan berbagai kegiatan operasional yang rinci, melekat, dan terintegrasi dalam kehidupan administrasi sehari-hari, sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang bersifat kompleks sekaligus kritis, oleh

karena itu diperlukan kesadaran dan pemahaman terhadap kompleksitas implementasi kebijakan sehingga dapat dirumuskan dan dilaksanakan upaya sistematis dan terencana. Kegiatan implementasi kebijakan akan menghasilkan suatu perubahan, baik perubahan fisik maupun non fisik yang akan mempengaruhi hidup dan kehidupan masyarakat. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh kinerja kebijakan dan proses implementasi kebijakan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada publik dilihat dari prinsip demokrasi, desentralisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat. (Herlina & Hermana, 2018).

2.1.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut (Ahmad & Darmiah, 2016) memberikan pandangan bahwa implelementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yakni :

- 1) Komunikasi (*communication*): Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya untuk kepentingan tertentu atau menyebarkanluaskannya. Disamping itu, sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula;
- 2) Sumberdaya (*resources*): Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana,

informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program dapat diarahkan kepada yang diharapkan serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana;

- 3) Disposisi atau Sikap (*diposition/attitude*): Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga sikap/respon implementor terhadap kebijakan yakni kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program ke arah penerimaan atau penolakan dan intensitas dari respon tersebut.
- 4) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*): Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak terlepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan, baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

2.2 Dana Pembangunan

Pembangunan daerah adalah salah satu agenda pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai daerah di Indonesia akan terus membangun daerahnya agar dapat menjadi yang lebih baik serta dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. (Baihaqi, 2011)

Menurut Kainde (2013) pembangunan daerah merupakan pembangunan yang semuanya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Pesatnya pembangunan daerah membutuhkan alokasi dan pembangunan yang besar sehingga menyebabkan belanja pemerintah daerah juga semakin meningkat. Besarnya belanja daerah ditentukan oleh besarnya pendapatan daerah yang bersangkutan. Instansi pemerintah daerah yang menerima anggaran belanja tentunya harus mampu menunjang pertumbuhan belanja daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari setiap kota/kabupaten yang ada di Indonesia. (Wati & Fajar, 2017)

Di Indonesia sendiri untuk menunjang pembangunan di daerah-daerah pemerintah pusat memberlakukan beberapa kebijakan, seperti kebijakan desentralis yang di dalamnya terdapat beberapa anggaran seperti dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus, (DAK), dana bagi hasil (DBH) dan pendapatan asli daerah (PAD).

2.2.1 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Tahar & Zakhiya, 2011)

Dana alokasi Umum (DAU) suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemberian DAU kepada pemerintah daerah merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana alokasi umum (DAU) apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup lebih panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan standard kehidupan masyarakat. (Harahap, 2017)

Tujuan dari dana alokasi umum (DAU) untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah

melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Secara definisi DAU diartikan sebagai berikut. Menurut Kuncoro (2004) Salah satu komponen dari Dana Perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep Kesenjangan Fiskal atau Celah Fiskal (*Fiscal Gap*), yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal. 2) Instrumen untuk mengatasi *horizontal imbalance*, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah di mana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah. 3) *Equalization grant*, yaitu berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang diperoleh daerah. (Hidayah & Setiyawati, 2014)

2.2.2 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menjelaskan bahwa dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk menjalankan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di kabupaten/ kota. Dana alokasi khusus (DAK) dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan

pembangunan daerah. Dana alokasi khusus (DAK) sepenuhnya digunakan untuk belanja modal untuk peningkatan fasilitas publik dengan kata lain tidak ada bagian dana alokasi khusus (DAK) yang digunakan untuk biaya operasional pembangunan seperti biaya perjalanan dinas dan sebagainya. (Harahap, 2017)

Tujuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana prasarana pelayanan dasar masyarakat dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dalam Mardiasmo (2006) Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki karakter yang paling spesifik di antara dana transfer lainnya di mana dana alokasi khusus (DAK) hanya dapat digunakan sesuai dengan menu kegiatan yang ditetapkan oleh Departemen Teknis yang terkait dengan bidang alokasi dana alokasi Khusus (DAK). Dana alokasi khusus (DAK) dapat dikategorikan sebagai *matching grant* karena adanya kewajiban penyediaan dana pendamping dan sekaligus *restricted grant* karena karakternya sebagai *categorical grant-in-aid*. (Hidayah & Setiyawati, 2014)

2.2.3 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah). (Yusriadi, 2017)

Dalam Wandira (2013). Dana Bagi Hasil Pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dimana isinya menjelaskan tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana bagi hasil (DBH) yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu dana bagi hasil (DBH) pajak dan dana bagi hasil (DBH) bukan pajak. Dana bagi hasil (DBH) bukan pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. (Nisa, 2017)

Dana bagi hasil (DBH) berfungsi sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak dan sumber daya alam (SDA) yang dibagihasilkan, termasuk sebagai pengkoreksi atas eksploitasi SDA selama ini. Menurut Devas (1989), dana bagi hasil (DBH) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang berguna dalam

menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya Devas (1989). Oleh sebab itu, daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) dan penghasilan pajak tinggi maka akan memiliki porsi pendapatan yang juga tinggi. Namun sayangnya potensi karakteristik sumber daya alam (SDA) dan sumber pajak di Indonesia sangat beragam sehingga hal itu memengaruhi sumber pendapatan daerah melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD). Menurut Bird *and* Vaillancourt (2002) pada akhirnya keterbatasan anggaran daerah tersebut akan menyebabkan penyediaan layanan publik menjadi lebih rendah. (Harefa, 2018)

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 33 tahun 2004 pasal 1, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari PAD adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. (Tahar & Zakhiya, 2011)

Menurut Nurcholis (2007) pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah

juga berasal dari daerah itu sendiri yakni pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. (Muhtarom, 2015)

Menurut Halim (2007) pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 ayat 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. (Safar, 2019)

Menurut (Muhtarom, 2015) sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu :

- 1) Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa langsung dipaksakan.
- 2) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik

pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil maupun materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetatinya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan maka sifat perubahan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah.
- 4) Lain-lain pendapatan yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, restibusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik

berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, dan memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

2.4 Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). (Magdalena dkk, 2013)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan hak desa sebagaimana pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah Pusat. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) menurut pasal 1 ayat 11 pada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 adalah “dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/ kota”. Alokasi Dana Desa juga merupakan stimulus bagi Pemerintahan Desa dalam membantu minimnya dana operasional untuk melaksanakan pelayanan bagi

masyarakat, pembangunan infrastruktur dan juga pemberdayaan masyarakat. (Permana, 2012)

2.4.1 Kebijakan Alokasi Dana Desa

Menurut PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pasal 11 ayat (2), dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan jumlah desa. Dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Menurut PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pasal 11 ayat (3), tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Menurut PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 8 ayat (2), angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) desa. IKG desa ditentukan oleh beberapa faktor meliputi:

- 1) Ketersediaan prasarana pelayanan dasar
- 2) Kondisi infrastruktur
- 3) Aksesibilitas/transportasi

Menurut PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 10 ayat (1) dan (2), tata cara pembagian dan

penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota, yang paling sedikit mengatur mengenai:

- 1) Tata cara penghitungan pembagian dana desa
- 2) Penetapan rincian dana desa
- 3) Mekanisme dan tahapan penyaluran dana desa
- 4) Prioritas penggunaan dana desa
- 5) Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa
- 6) Sanksi administratif.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 38 ayat (4), pertanggungjawaban dana desa tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang menjadi tanggungjawab kepala desa sebagai pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban ditetapkan dengan peraturan desa, dan dilampirkan :

- 1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan
- 2) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan
- 3) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan tersebut disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 38 ayat 4).

2.4.2 Perencanaan Pembangunan Desa

Pengertian perencanaan secara konvensional merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk meraih masa depan yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya. Perencanaan (*planning*) adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pembangunan desa dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) merupakan salah satu Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa untuk periode 6 Tahun sesuai dengan masa pemerintahan Kepala Desa terpilih. RPJMDes merupakan

keselarasan antara visi dan misi dari Kepala Desa terpilih. 20 Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- 2) RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu Satu Tahun. Daftar Usulan RKP adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

2.4.3 Tujuan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki beberapa tujuan. Menurut (Hasman, 2015) tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

2.5 Pembangunan Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 78 dalam rangka melaksanakan pembangunan maka tahapan pertama yakni perencanaan. Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa dapat disesuaikan dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten /Kota. Menurut (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2009) Melaksanakan perencanaan pembangunan desa lebih terdapat 2 (dua) pendekatan yakni *Pertama*, Pendekatan *bottom-up* yang mempunyai makna perencanaan yang dilakukan atau yang diusulkan dari masyarakat tingkat bawah atau lebih mengutamakan partisipasi masyarakat Desa dalam menentukan program kerja Desa. *Kedua*, Pendekatan Teknokratik yang memiliki arti bahwa perencanaan pembangunan disusun oleh lembaga/orang yang memahami tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa. Pendekatan ini digunakan sebagai pelaksanaan fungsi kelembagaan Desa. (Zainudin & Sutjiatmi, 2018)

2.6 Persepsi Masyarakat

Rakhmat (2011) mengemukakan persepsi adalah pengalaman tentang objek, kejadian, atau hubungan-hubungan

yang didapatkan tentang cara mengambil kesimpulan informasi dan menafsirkan pesan, memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimuli*), serta kesadaran pemikiran mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu.

2.7 Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa

Persepsi individu yang berkelompok dalam lingkungan masyarakat bisa juga di sebut dengan persepsi masyarakat, persepsi masyarakat merupakan salah satu hal yang berpengaruh dalam segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan dilingkungan masyarakat. Suatu program kegiatan akan berjalan lancar dan mencapai tujuan apabila masyarakat yang ikut berpartisipasi aktif dan memberikan persepsi dan partisipasi yang positif. (Isti, Komar, & Heryanto, 2017)

2.8 Partisipasi Masyarakat

Menurut (Wibisana, 1989) Partisipasi secara harfiah mengandung arti ikut serta yang berasal dari kata asing “*take a part*” atau ambil bagian. Secara lebih umum lagi kata partisipasidapat berarti ikut sertanya suatu kesatuan untuk ambil bagian dalam aktifitas yang dilaksanakan oleh susunan kesatuan yang lebih besar. Sejalan dengan hal tersebut istilah partisipasi masyarakat juga sering diartikan sebagai keikutsertaan keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijakan hingga pelaksanaan program.

Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung berupa keuangan, pemikiran dan material yang diperlukan. Pengertian diatas mengandung maksud bahwa partisipasi merupakan proses keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam mengambil suatu keputusan. Keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut sudah dapat dianggap sebagai suatu peran serta masyarakat dalam berpartisipasi. (Bowo, 2006)

2.9 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa

Mengenai bentuk dan tahap partisipasi dari pendapat yang dirangkum Ndraha (1990) dapat kita lihat sebagai berikut:

- 1) Partisipasi dalam/melalui kontak yang lain (*contact change*) sebagai salah satu bentuk titik awal perubahan
- 2) Partisipasi dalam bentuk memperhatikan atau menyerap dan memberi tanggapan terhadap baik dalam arti menerima, mentaati, memenuhi, dalaksanakan, mengiyakan, menrima dengan syarat, maupun dalam arti menolkanya.
- 3) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termaksud dalam pengambilan keputusan/penetapan rencana. Perasaan terlibat dalam hal perencanaan perlu ditimbulkan sedini mungkin didalam masyarakat. Partisipasi ini juga disebut dengan partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan politik yang menyangkut mereka, partisiapsi

dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan politik yang menyangkut mereka, partisipasi yang bersifat proyek atau desain proyek.

- 4) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan
- 5) Partisipasi dalam penerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang disebut "*participation in benefits*".
- 6) Partisipasi dalam menilai pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan sesuai rencana dan sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa yaitu faktor interen dan eksteren. Faktor interen berupa kesadaran atau kemauan masyarakat itu sendiri, Pendidikan dan pendapatan masyarakat. Faktor Pendidikan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan adalah jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi masyarakat pembangunan, dan kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat memiliki tingkat Pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap-kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun yang dilakukan masyarakat. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa betapa besar pengaruh Pendidikan

terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selanjutnya faktor pendapatan juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat khususnya dalam bentuk sumbangan dan kegiatan. Pada sisi lain, kesibukan aktifitas juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pada sisi lain juga, faktor yang mendorong partisipasi masyarakat dari faktor eksternal yaitu dorongan pemerintah desa dan ketersediaan fasilitas desa. (Melis, Muthalib, & Apoda, 2016)

2.10 Indikator dari sisi Pemerintah Terkait Keberhasilan Pembangunan Desa

Menurut (Ahmad & Darmiah, 2016) Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yakni :

- 1) Komunikasi (*communication*) : Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya untuk kepentingan tertentu atau menyebarkanluaskannya. Disamping itu, sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula;
- 2) Sumberdaya (*resources*) : Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan sumber-sumber terkait

dalam pelaksanaan program dapat diarahkan kepada yang diharapkan serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana;

- 3) Disposisi atau Sikap (*diposition/attitude*) : Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga sikap/respon implementor terhadap kebijakan yakni kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program ke arah penerimaan atau penolakan dan intensitas dari respon tersebut.
- 4) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*) : Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak terlepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan, baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

2.11 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya akan menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang

sedang dilakukan. Dari penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan judul yang sama dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis. Namun penulis mengambil beberapa penelitian sebagai referensi dalam upaya memperkaya bahan penelitian penulis. Berikut ini merupakan beberapa penelitian sebelumnya berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Metodelogi Penelitian	Persaamaan	Perbedaan
1	Kholik (2017)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sibolang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala” berjalan kurang baik. Karena, Dimensi Komunikasi dilihat dari aspek Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, kurang dilaksanakan oleh. Pemerintah Desa sehingga berdampak kepada rendahnya partisipasi dari masyarakat mengikuti kegiatan perumusan program. Bukan itu saja, ketidak tahuan tentang manfaat dari ADD membuat masyarakat kurang berpartisipasi pada setiap pelaksanaan program yang telah dirumuskan. Dimensi Sumber Daya kurang memadai, baik dilihat dari sumber daya manusia, sarana prasarana dan saran penunjang lainnya	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sibolang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala. Memasukkan variabel partisipasi masyarakat..	Sedangkan penelitian ini meneliti tentang Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabuptaen Aceh Barat Daya. Tidak mengambil variabel dimensi struktur organiasasi.

Lanjutan 2.1

2	Hasman (2015)	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi” berjalan kurang baik. Karena, Dimensi Komunikasi dilihat dari aspek sosialisasi kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi, kurang dilaksanakan oleh Kecamatan dan Desa. Dimensi sumber daya kurang memadai, baik dilihat dari sumber daya manusia maupun sarana prasarana. Dimensi disposisi dalam hal ini komitmen pengelola maupun masyarakat dalam pelaksanaan ADD berjalan kurang baik, karena usulan tidak berbasis kebutuhan masyarakat. Dimensi Struktur Organisasi dilihat dari mekanisme pengelola pelaksanaan seluruh rangkaian tahapan pengelolaan ADD berjalan kurang baik, karena penyusunan program pembangunan yang dibiayai ADD disusun oleh pihak Kecamatan bukan Desa	Meneliti tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi.	Penelitian ini meneliti tentang Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabuptaen Aceh Barat Daya. Tidak mengambil variabel sumber daya
3	John P, (2015)	“Implementasi Kebijakan Anggaran Alokasi Dana Desa Di Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang” menyimpulkan Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) belum berjalan dengan efektif dan tepat sasaran dan tidak	Implementasi Kebijakan Anggaran Alokasi Dana Desa Di Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang.	Sedangkan penelitian ini meneliti tentang Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Aceh Barat Daya. Tidak fokus pada

Lanjutan 2.1

		berjalan dengan semestinya. Proses implementasi kebijakan belum sesuai, belum dilakukan dengan komunikasi yang baik, isi dan tujuan kebijakan Alokasi Dana Desa belum sepenuhnya dipahami oleh pelaksana kebijakan, serta isi dan tujuan kebijakan Alokasi Dana Desa belum diketahui oleh masyarakat selaku sasaran kebijakan karna kurangnya sosialisasi dari pembuat kebijakan itu sendiri. Dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa pelaksana kebijakan belum didukung dengan sumber daya yang cukup dan masih banyak kekurangan yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak dapat dilakukan secara optimal dan sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaan kebijakan para pelaksana kebijakan melakukan pembangunan dana Alokasi Dana Desa belum adanya sikap kejujuran dan komitmen yang tinggi serta belum adanya kepatuh terhadap ketentuan yang ada yang telah disepakati bersama. d. Dalam menjalankan pembangunan para pelaksana kebijakan belum bekerja dengan <i>standart operation procedur (SOP)</i> atau tugas pokok dan fungsi		proses implementasi anggaran alokasi dana desa
--	--	---	--	---

Lanjutan 2.1

		serta belum melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa		
4	Magdalena, dkk (2013)	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara” berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa) yang dasar penyusunannya adalah aspirasi dari masyarakat desa langsung melalui Musrenbang, baik dari tingkat dusun tingkat Desa dan tingkat kecamatan mengenai kebutuhan pembangunan, penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban. Sehingga pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa sudah optimal. Namun indikasi tujuan untuk meningkatkan partisipasi swadaya gotong – royong masyarakat justru mengalami penurunan yang disebabkan oleh alokasi dana pembangunan desa – desa di Kecamatan Tenggarong Seberang bukan hanya bersumber dari ADD, namun juga bersumber dari dana APBD, PNPM, Comdev dan CSR dari perusahaan	meneliti tentang implementasi alokasi dana desa di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara	Sedangkan penelitian ini meneliti tentang Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabuptaen Aceh Barat Daya. Tidak memasukkan variabel seperti jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk, kesehatan, pendidikan dan keterjangkauan jarak desa ke Kabupaten.

Lanjutan

		perusahaan tambang yang berlokasi di Kecamatan Tenggarong Seberang. Sehingga swadaya masyarakat hanya bersifat kegiatan gotong – royong dalam proses realisasi pembangunan, dalam bentuk tenaga dan material sebagai pelengkap realisasi tersebut.		
5	Permana (2012)	“implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong” berjalan dengan baik walaupun dilihat dari indikator ketepatan alokasi sumber dana penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan fisik masih keliru, indikator keterpaduan hierarki diantara instansi pelaksana belum optimal dengan minimnya koordinasi Tim ADD Desa dengan Tim Kecamatan dan Kabupaten serta penyampaian laporan rutin yang terlambat, dalam indikator kemampuan aparat pelaksana masih terkendala belum disiplinnya perangkat desa dalam bekerja, untuk indikator masalah-masalah dalam implementasi kebijakan yaitu belum ditempatkannya sekdes PNS dan pencairan dana ADD yang selalu terlambat.	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabuptaan Aceh Barat Daya. Tidak fokus pada faktor-faktor yang menghambat dan mendorong terlaksananya kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)	Sedangkan penelitian ini meneliti tentang Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabuptaan Aceh Barat Daya. Tidak fokus pada faktor-faktor yang menghambat dan mendorong terlaksananya kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)

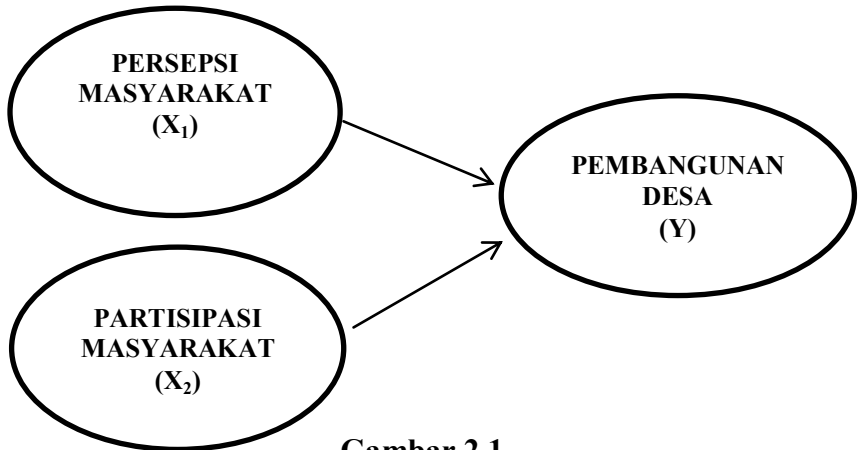
Sumber: Olahan Peneliti (2020)

2.12 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan mempresentasikan suatu himpunan dan beberapa konsep serta hubungan diantara konsep tersebut (Polancik, 2009).

Menurut Mubyarto (1984) persepsi masyarakat merupakan salah satu hal yang berpengaruh dalam segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan dilingkungan masyarakat. Suatu program kegiatan akan berjalan lancar dan mencapai tujuan apabila masyarakat yang ikut berpartisipasi aktif dan memberikan persepsi dan partisipasi yang positif. (Isti, Komar, & Heryanto, 2017)

Konsep partisipasi merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis dan terstruktur dengan melibatkan masyarakat untuk mengambil inisiatif, pengambilan keputusan, menetapkan arah dan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan mengevaluasi dengan mengoptimalkan potensi dan kemampuan yang ada padanya. Dengan demikian beberapa poin menyangkut dengan partisipasi masyarakat di atas sangat berpengaruh terhadap pembangunan desa. (Zainudin & Sutjiatmi, 2018)



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran 2.1 untuk melihat keberhasilan pembangunan Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya melibatkan persepsi masyarakat dan partisipasi masyarakat.

2.13 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan suatu hubungan antara dua variabel yang berkaitan dengan suatu kasus tertentu dan merupakan anggapan sementara yang perlu diuji benar atau tidak benar tentang dugaan dalam suatu penelitian serta memiliki manfaat bagi proses penelitian agar efektif dan efisien. Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal tersebut dan dituntut untuk melakukan pengecekannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat di susun hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Persepsi mempengaruhi Pembangunan Kerja

$H_{0.1}$: Persepsi tidak mempengaruhi Pembangunan Desa

H_{01} : Partisipasi mempengaruhi Pembangunan Desa

$H_{0.2}$: Partisipasi tidak Mempengaruhi Pembangunan Desa

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode untuk menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel (Noor, 2012).

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, penelitian ini berbasis pada penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang bersifat mengembangkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. (Sugiyono, 2012).

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan berbagai macam data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. (Winarni, 2018).

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya. Dasar pemilihan lokasi tersebut karena penulis berasal dari lokasi tersebut yang membuat penulis mudah mendapatkan informasi dan data yang diperlukan terkait dengan penelitian ini.

3.4 Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data primer merupakan data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerak atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informasi yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung. (Arikunto, 2010).

Perolehan data primer dari penelitian ini didapatkan dengan cara studi lapangan (*survei*). Alat pengumpulan data berupa kuesioner/angket. yang ditanyakan kepada responden di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya. Data primer yang akan dikumpulkan meliputi data tentang persepsi masyarakat dan partisipasi masyarakat.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang akan di jelaskan kepada responden dengan serangkaian daftar pertanyaan (kuesioner) mendetail dengan urutan yang telah ditetapkan sebelumnya dan proses interview tersebut harus mengikuti urutan dan daftar pertanyaan yang telah ditetapkan secara ketat, sehingga didapatkan responden yang dapat mewakili tujuan penelitian.

3.4.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Kecamatan Manggeng yang terletak di Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh. Maka pada Kecamatan Manggeng tersebut peneliti menarik beberapa sampel untuk menjadi sampel pada penelitian ini.

Pengertian sampel menurut Sugiyono (2012) adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif (mewakili)”. Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi. Dalam penelitian ini sampelnya adalah masyarakat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya. Jumlah penduduk di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2018 berjumlah 14.139 jiwa.

3.4.4 Teknik Pengumpulan Sampel

Penentuan jumlah sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah berdasarkan metode *random sampling*. Random sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Di mana penulis mengambil informan dari setiap Desa di populasi yang berjumlah 17 Desa. Total informan dari keseluruhan adalah 102 informan.

Simple Random sampling dinyatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa

memperhatiak strata yang ada dalam populasi itu. *Simple random Sampling* adalah Teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit *sampling*. Maka setiap unit *sampling* sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasinya.

Dalam penentuan ukuran sampel dari populasi digunakan rumus Slovin, yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+N.(e)^2} \quad (3.1)$$

Ket :

n = Besar Sampel

N = Populasi

e = Nilai kritis yang di toleransi 5%

Dari total populasi sebesar 135 orang, maka jumlah sampelnya adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{135}{1 + N. (e)^2}$$

$$n = \frac{135}{1 + (0.33)}$$

$$n = \frac{135}{1.33}$$

$$n = 101,50 \text{ (dibulatkan menjadi 102 sampel)}$$

Penentuan jumlah sampel dengan jumlah populasi 135 orang dengan tingkat kepercayaan sebesar 5%.

3.4.5 Skala Pengukuran

Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan dengan indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen berupa pertanyaan atau pernyataan, menurut Sugiyono (2012). Untuk menjawab dari pertanyaan atau pernyataan tersebut maka jawaban diberi skor sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Ukuran dan Penilaian

No	Keterangan Pilihan	Skor
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
2	Tidak Setuju (TS)	2
3	Netral (N)	3
4	Setuju (s)	4
5	Sangat Setuju (SS)	5

Sumber; olahan peneliti (2020)

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2013:121) uji validitas adalah hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Sebelum independen penelitian digunakan untuk

mengumpulkan data perlu dilakukan pengujian validitas. Hal ini digunakan untuk mendapatkan data yang valid dari independen yang valid. Dalam penelitian ini, penentuan validitas dapat dilakukan dengan mencari nilai korelasi skor masing-masing item skor dengan skor total item untuk setiap variabel. Pengukuran validitas dilakukan dengan membandingkan antar r hitung dengan r tabel jika :

1. $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ (valid)
2. $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ (tidak valid)

3.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika cronbach's alpha > 0.60 dan dikatakan tidak reliabel jika cronbach's alpa < 0.60 . (Ghozali, 2012:47).

3.6 Operasional Variabel Penelitian

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelaajri dan ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2012).

Penelitian ini menggunakan 2 variabel, yaitu : variabel dependen dan variabel Independen.

3.6.1 Variabel dependen

variabel dependen (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel Independen. (Sangadji dan Sopiah,2010).

Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pembangunan Desa

3.6.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (X) (Sangadji dan Sopiah, 2010).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah persepsi dan partisipasi.

- 1) Persepsi menurut Rakhmat (2011, hlm.50) dalam mengemukakan persepsi adalah pengalaman tentang objek, kejadian, atau hubungan-hubungan yang didapatkan tentang cara mengambil kesimpulan informasi dan menafsirkan pesan, memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimuli*), serta kesadaran pemikiran mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses pengamatan yang dilakukan individu melalui alat indera tentang objek, peristiwa, dan pengalaman dari lingkungannya sehingga individu menyadari dan merespon terhadap stimulus tersebut. Dalam hal ini tanggapan dan partisipasi masyarakat

terhadap pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. (Isti, Komar, & Heryanto, 2017)

- 2) Partisipasi menurut Pidarta dalam Mubyarto (1984), adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan semua kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam kegiatan yang dilaksanakan. (Isti, Komar, & Heryanto, 2017)

Tabel 3.2
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Pengertian	Indikator	Skala
Pembangunan Desa (Y)	Pembangunan desa adalah seluruh rangkaian usaha yang dilakukan di lingkungan desa yang bertujuan mempertinggi taraf hidup masyarakat desa, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat dengan rencana yang dibuat atas dasar musyawarah dikalangan masyarakat.	a. Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur b. Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah c. Perbaikan lingkungan dan pemukiman d. Perbaikan sarana dan prasarana sekolah dan pelayanan kesehatan e. Modal usaha masyarakat f. Kegiatan pelatihan masyarakat g. Menyediakan alat-alat produksi Meningkatkan ekonomi masyarakat	Likert

Tabel 3.2 (Lanjutan)

		h. Kesejahteraan masyarakat	
Persepsi (X1)	persepsi adalah pengalaman tentang objek, kejadian, atau hubungan-hubungan yang didapatkan tentang cara mengambil kesimpulan informasi dan menafsirkan pesan, memberikan makna pada stimulus inderawi (<i>sensory stimuli</i>), serta kesadaran pemikiran mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu	a. Informasi dana desa b. Besaran jumlah dana desa c. Manfaat dana desa d. Sikap kepedulian masyarakat e. Kesadaran mematuhi aturan f. Kesadaran untuk meningkatkan g. kesejahteraan masyarakat Merasa lebih baik dengan adanya dana desa h. Mengembangkan potensi gampong i. Tindakan mengatasi permasalahan	Likert
Partisipasi (X2)	Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan semua kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam kegiatan yang dilaksanakan.	a. Musyawarah Gampong b. Memberikan ide, gagasan dan tanggapan. c. Proposal sesuai dengan kebutuhan d. Melakukan sosialisasi kepada warga lain e. Memberikan sumbangan tenaga f. Memberikan sumbangan materi g. Memberikan penilaian h. Melakukan pengawasan dan pengaduan i. Melakukan pemeliharaan kegiatan	Likert

Sumber: Olahan Peneliti (2020)

3.7 Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif, maka model tersebut harus memenuhi asumsi klasik regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

3.7.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2006) dalam penelitian Forddanta dan Nugroho (2012), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusannya adalah :

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.7.2 Uji Multikolinearitas

Seperti yang dikatakan Algifari (2000) dalam penelitian Forddanta dan Nugroho (2012), penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas adalah antar variabel independen yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Menurut Ghozali (2006) dalam penelitian Forddanta dan Nugroho (2012), terdapat beberapa cara untuk menemukan hubungan antara variabel X yang satu dengan variabel X yang lainnya (terjadinya multikolinearitas), adalah:

- 1) Memiliki korelasi antar variabel bebas yang sempurna (lebih dari 0,9), maka terjadi problem multikolinearitas.
- 2) Memiliki nilai VIF lebih dari 10 (> 10) dan nilai *tolerance* kurang dari 0,10 ($< 0,10$), maka model terjadi problem multikolinearitas.

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2006) dalam penelitian Forddanta dan Nugroho (2012), Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak

terjadi Heteroskedastisitas. Dasar analisis terjadi Heteroskedastisitas adalah:

Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8 Metode Analisis

3.8.1 Regresi Linier Berganda

Model penelitian menggunakan metode regresi linear berganda Menurut Sugiyono (2012: 275) analisis regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan keadaan (naik turunnya) variabel dependen, jika dua atau lebih variabel independent sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Model analisis ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk meneliti variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat. Persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta X_1 + \beta_1 X_2 + e \quad (3.2)$$

Y : Variabel dependen

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2,$: Koefisien regresi variabel X_1, X_2

X_1 : Variabel bebas

X_2 : Variabel bebas

e : *Error term*

Dalam penelitian ini variabel dependen adalah pembangunan desa (Y) dan variabel independen adalah persepsi masyarakat (X_1) dan partisipasi masyarakat (X_2). Rumus estimasi regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Y : Pembangunan Desa

α : Konstanta

β_1, β_2 : Koefisien regresi variabel X_1, X_2

X_1 : Persepsi masyarakat

X_2 : Partisipasi masyarakat

e : *Error term*

3.9 Pengujian Hipotesis

3.9.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t di gunakan untuk menguji parameter hasil estimasi (*unrestricted*) terhadap suatu nilai tertentu (*restricted*). Pengujian terhadap parameter (koefisien) hasil dari estimasi menggunakan uji dua arah statistik t (Ekananda,2015:63).

- 1) $H_0 : b_1 = 0$ tidak ada pengaruh antara variable persepsi dan partisipasi dengan pembangunan desa.
- 2) $H_1 : b_1 > 0$ ada pengaruh positif antara variable persepsi dan partisipasi dengan
- 3) Pembangunan desa
- 4) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak (variabel bebas X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y)

- 5) Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka tidak dapat menolak H_0 (variabel bebas X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y).

3.9.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F di gunakan untuk menguji parameter hasil estimasi (*unrestricted*) terhadap suatu nilai tertentu (*restricted*), namun pengujian standar yang di lakukan pada sebagian besar *software* statistik adalah menguji beberapa parameter hasil estimasi (*unrestricted*) terhadap nilai-nilai tersebut sama dengan nol (*restricted*) (Ekananda,2015:67).

- 1) $H_0 : b_1 = 0$ variabel independen tidak mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama
- 2) $H_1 : b_1 \neq 0$ variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.

3.9.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Imam Ghozali (2005) dalam penelitian Forddanta dan Nugroho (2012), koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap

jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variable independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variable independen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai Adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Manggeng merupakan Kecamatan indu di Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh. Manggeng memiliki luas wilayah sekitar 40,94 Km² (sumber: BPS Banda Aceh). Letak astronomis Kecamatan Manggeng adalah; 3o35'50" LU - 3o41'0"LU dan 96o35'40" BT – 97o6'50" BT dan letak geografis adalah :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tangan-tangan.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Lembah Sabil.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan.

Manggeng merupakan wilayah dengan ketinggian di atas 1.000 mdpl. Konsentrasi penduduk umumnya terletak sepanjang jalan Nasional Meulaboh-Tapak Tuan. Sebagian kecil yang berdomisilli di daerah perbukitan. Pemanfaatan lahan diperuntukkan untuk pertanian, perkebunan, pertambangan dan juga peternakn. Dalam bidang pertanian, Manggeng merupakan salah satu daerah primadona yang potensial untuk dikembangkan dan terkenal sebagai salah satu lambung padi Aceh Barat Daya, dnegan luas sekita 2.414 ha menghasilkan 17.502 ton padi.

Jumlah penduduk Manggeng pada tahun 2014 tercatat berjumlah 13.388 jiwa, luas wilayah 40,98 km, setiap km 2 ditempati penduduk sekitar 327 orang dan Sebagian besar petani. Dari 18 Gampong/desa hany satu desa yang tidak memiliki persawahan, penduduk desa tersebut mayoritas sebagai nelayan.

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden Pembangunan desan di Kecamatan Manggeng Aceh Barat Daya yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

No.	Karakteristik Responden	Jumlah Responden
1	Berdasarkan Jenis Kelamin	
	Laki-laki	56
	Perempuan	46
	Jumlah	102
2	Berdasarkan Pekerjaan	
	Pensiunan	1
	PNS	3
	Security	1
	Nelayan	8
	Petani	11
	IRT	29
	Bengkel	2
	Wiraswasta	36
	Mahasiswa	11
	Jumlah	102
3	Berdasarkan pendidikan terakhir	
	SLTP	24
	SLTA	66
	SMP	1
	SMA	1
	DIII	2
	S1	8
	Jumlah	102

Sumber : Data primer yang di olah (2020)

Responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini merupakan pembangunan desa yang ada di kecamatan manggeng kabupaten Aceh Barat Daya. Adapun jumlah responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 102 orang. Berdasarkan pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah responden yang terdiri dari 56 orang laki-laki dan 46 orang perempuan. Kemudian pada responden berdasarkan pekerjaan yang tertinggi yaitu wiraswasta yang mencapai 36 orang sedangkan paling rendah security yaitu 1 orang dan berdasarkan pendidikan terakhir yang paling tinggi SLTA mencapai 66 orang kemudian yang paling rendah SMP dan SMA 1 orang.

4.3 Tanggapan Responden

4.3.1 Tanggapan Responden terhadap Persepsi Masyarakat (X1)

Adapun tanggapan responden terhadap persepsi masyarakat diuraikan dalam 9 pertanyaan, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Tanggapan Responden terhadap Persepsi Masyarakat

No	Pernyataan	Rata-rata
1	Saya mengetahui tentang informasi pemberian Alokasi Dana Desa (ADD)	3.28
2	Saya mengetahui besaran jumlah Alokasi Dana Desa (ADD)	3.25
3	Saya merasakan manfaat dari Alokasi Dana Desa (ADD)	3.38
4	Saya peduli dengan program kegiatan Alokasi Dana Desa	3.60
5	Saya menyadari kepatuhan aturan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)	3.35
6	Saya merasakan dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dari penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)	3.66
7	Adanya Alokasi Dana Desa (ADD) membuat saya merasa lebih baik dan diuntungkan	3.41
8	Menurut saya Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mengembangkan potensi dan kebutuhan <i>gampong</i>	3.66
9	Selama ini implementasi program kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mengatasi permasalahan pembangunan <i>gampong</i>	3.52
Rata-rata total		3,46

Sumber : Data Primer yang di olah (2020)

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa hasil tanggapan responden terhadap persepsi masyarakat yaitu nilai rata-rata terendah sebesar 3,25 dan nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,66. Bisa di lihat bahwa nilai rata-rata totalnya sebesar 3,46 dalam artiannya bahwa nilai tersebut termasuk ke dalam kategori netral (N). Adapun anggapan respondennya terhadap persepsi masyarakat adalah netral.

4.3.2 Tanggapan Responden terhadap Partisipasi Masyarakat (X2)

Adapun tanggapan responden terhadap partisipasi masyarakat diuraikan dalam 9 pertanyaan, dapat di lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Tanggapan Responden terhadap Partisipasi Masyarakat

No	Pernyataan	Rata-rata
1	Saya mengikuti musyawarah gampong terkait dengan program Alokasi Dana Desa (ADD)	3.16
2	Saya ikut serta memberikan ide, gagasan dan tanggapan dalam rapat Alokasi Dana Desa (ADD)	3.05
3	Saya berpartisipasi dalam membuat proposal program kegiatan peenggunaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan kebutuhan gampong	3.02
4	Saya ikut melakukan sosialisasi terkait dengan peelaksanaa kegiatan dari Alokasi Dana Desa (ADD)	3.22
5	Saya ikut serta dalam memberikan sumbangan tenaga atau materi dalam pelaksanaan kegiatan dari program penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)	3.08
6	Saya ikut serta dalam memberikan sumbangan materi dalam pelaksanaan kegiatan dari program	3.05
7	Saya ikut menilai hasil kegiatan dari program penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)	2.99
8	Saya ikut serta dalam mengawasi dan melakukan pengaduan apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan dari program penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)	3.00
9	Saya melakukan pemeliharaan terhadap hasil kegiatan dari program penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)	3.29
Rata-rata total		3.09

Sumber: Data primer yang di olah (2020)

Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa hasil tanggapan responden terhadap kesempatan kerja yaitu nilai rata-rata terendah sebesar 2,99 dan nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,29. Bisa di lihat

bahwa nilai rata-rata totalnya sebesar 3,09 dalam artiannya bahwa nilai tersebut termasuk ke dalam kategori netral (N). Adapun anggapan respondennya yaitu partisipasi masyarakat adalah netral.

4.3.3 Tanggapan Responden terhadap Pembangunan Desa (Y)

Adapun tanggapan responden terhadap pembangunan desa diuraikan dalam 9 pertanyaan, dapat di lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.4
Tanggapan Responden terhadap Partisipasi Masyarakat

No	Pernyataan	Rata-rata
1	Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur gampong	3.85
2	Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana Masjid gampong	4.08
3	Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk perbaikan lingkungan dan pemukiman masyarakat gampong	3.96
4	Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah dan pelayanan Kesehatan	3.86
5	Pemerintah Gampong memberikan modal usaha dengan memanfaatkan anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD)	3.43
6	Pemerintah Gampong melakukan kegiatan pelatihan masyarakat dengan memanfaatkan anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD)	3.80
7	Pemerintah Gampong menyediakan bahan-bahan alat produksi dengan memanfaatkan anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD)	3.69
8	Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) meningkatkan ekonomi masyarakat	3.92
9	Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Fokus dalam hal mensejahterakan masyarakat	3.86
Rata-rata total		3.83

Sumber: Data primer yang di olah (2020)

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa hasil tanggapan responden terhadap pendidikan yaitu nilai rata-rata terendah

sebesar 3,43 dan nilai rata-rata tertinggi sebesar 4.08. Bisa di lihat bahwa nilai rata-rata totalnya sebesar 3,83 dalam artiannya bahwa nilai tersebut termasuk ke dalam kategori netral (N). Adapun anggapan respondennya yaitu pembangunan desa adalah netral.

4.4 Hasil Metode Analisis Data

4.4.1 Hasil Uji Validitas

Dalam menentukan tingkat validitas maka dapat dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan nilai r_{tabel} . Adapun r_{tabel} didapatkan dengan cara melihat tabel dan menghitung *degree of freedom* (df) = $n-2$ terlebih dahulu. Dalam hal ini (n) merupakan jumlah sampel sebanyak 102 responden. Adapun df nya yaitu $102-2$ maka hasil $df = 100$ dengan alpha (α) 0,05 didapatkan r_{tabel} 0.1946, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid.

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas

Variabel	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Persepsi Masyarakat (X1)			
X1.1	0.698	0.1946	Valid
X1.2	0.549	0.1946	Valid
X1.3	0.602	0.1946	Valid
X1.4	0.597	0.1946	Valid
X1.5	0.430	0.1946	Valid
X1.6	0.597	0.1946	Valid
X1.7	0.540	0.1946	Valid
X1.8	0.441	0.1946	Valid
X1.9	0.523	0.1946	Valid
Partisipasi masyarakat (X2)			

X2.1	0.504	0.1946	Valid
X2.2	0.665	0.1946	Valid
X2.3	0.635	0.1946	Valid
X2.4	0.627	0.1946	Valid
X2.5	0.717	0.1946	Valid
X2.6	0.765	0.1946	Valid
X2.7	0.554	0.1946	Valid
X2.8	0.477	0.1946	Valid
X2.9	0.534	0.1946	Valid
Pembangunan Desa (Y)			
Y1	0.483	0.1946	Valid
Y2	0.590	0.1946	Valid
Y3	0.650	0.1946	Valid
Y4	0.583	0.1946	Valid
Y5	0.229	0.1946	Valid
Y6	0.382	0.1946	Valid
Y7	0.639	0.1946	Valid
Y8	0.731	0.1946	Valid
Y9	0.582	0.1946	Valid

Sumber: Output SPSS 22 data diolah (2020).

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masing-masing butir pertanyaan memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,1946) dan bernilai positif, dengan demikian butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Syarat suatu pertanyaan dapat dikatakan valid adalah apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$. Di sini semua butir pertanyaan dikatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$.

4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas untuk melihat konsistensi jawaban dari butir-butir pertanyaan yang diperoleh dari responden. Uji reliabilitas dari hasil penelitian tersebut dapat diurikan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	r_{kritis}	Keterangan
Persepsi Masyarakat (X1)	9	0.733	0,60	Reliabilitas
Partisipasi masyarakat (X2)	9	0.751	0,60	Reliabilitas
Pembangunan Desa (Y)	9	0.728	0,60	Reliabilitas

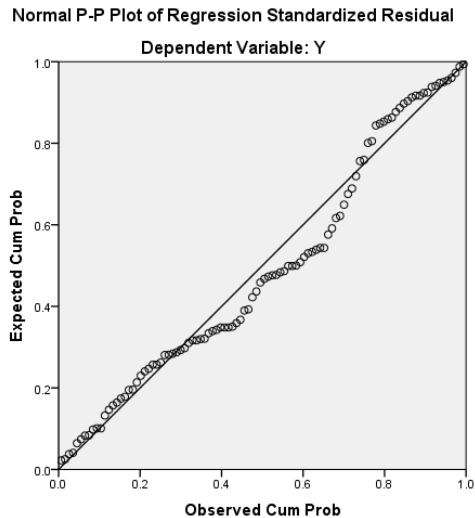
Sumber: Output SPSS 22 data diolah (2020).

Berdasarkan tabel 4.6 dapat menunjukkan bahwa variabel persepsi masyarakat memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar $0,733 > 0,60$, kemudian partisipasi masyarakat memiliki nilai Cronbach's Alpha $0,751 > 0,60$, pendidikan memiliki nilai Cronbach's Alpha $0,867 > 0,60$, dan pembangunan desa memiliki nilai Cronbach's Alpha $0,728 > 0,60$, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tersebut reliabel karena nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60.

4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya terdistribusi normal atau tidak.



Sumber: Output SPSS 22 data diolah (2020)

Gambar 4.1
Grafik Normal P-Plot

Dilihat dari gambar 4.1 di atas, menunjukkan bahwa data menyebar mendekati garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal (membentuk garis lurus), maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal sehingga dapat disimpulkan bahwa telah layak dipakai atau memenuhi asumsi normalitas.

4.5.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada atau tidak adanya variabel bebas yang memilih kemiripan antar variabel bebas dalam suatu model. Kemiripan antara variabel akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Jika *VIF* (*Variance Inflation Factor*) menghasilkan antara 1-10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Apabila Multikolinearitas menghasilkan nilai

VIF > 10 atau *tolerance value* < 0,10 maka akan terjadi multikolinearitas (Sujarweni, 2014).

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	18.166	2.336		7.777	.000		
X1	.371	.081	.423	4.573	.000	.786	1.273
X2	.169	.064	.247	2.668	.009	.786	1.273

a. Dependent Variable: Y
Sumber: Output SPSS 22 data diolah (2020).

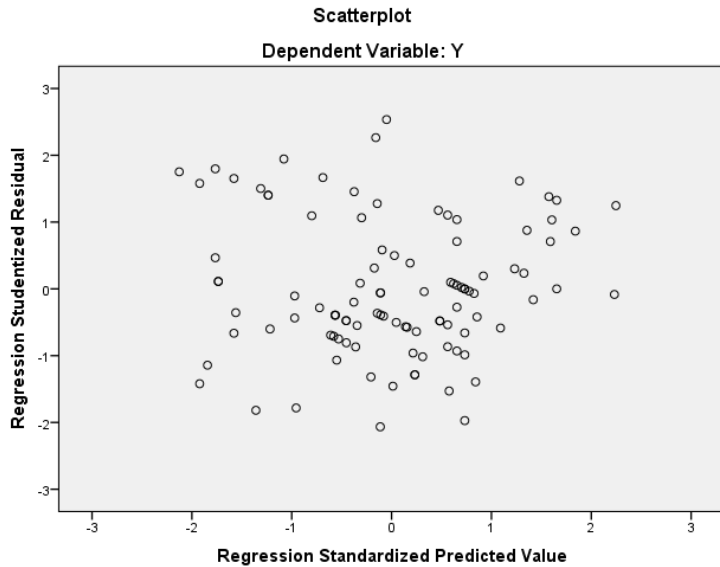
Pada Tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan nilai VIF yaitu sebagai berikut:

- 1) X1 dengan nilai VIF = 1.273 > 0,1
- 2) X2 dengan nilai VIF = 1.273 > 0,1

Dari hasil pengolahan tersebut dapat dilihat bahwa nilai VIF (*Varians Inflation Factor*) antara persepsi masyarakat (X1), partisipasi masyarakat (X2), tidak terjadi masalah Multikolinearitas, karena nilai masing-masing VIF lebih kecil dari 0.1, Dimana jika VIF >0,1, maka tidak terdapat Multikolinearitas antar variabel bebas dalam penelitian ini.

4.5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan variance residual dalam suatu periode pengamatan keperiode pengamatan yang lain. Berikut merupakan gambar uji heteroskesdastisitas.



Sumber: Output SPSS 22 data diolah (2020).

Gambar 4. 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.2 scatterplot diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pola yang jelas, kemudian titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, serta penyebaran titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadinya heteroskedastisitas, sehingga model regresi ini layak dipakai.

4.6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan data yang diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS 22 dapat diperoleh hasil model regresi berganda.

Adapun hasil model regresi dilihat pada Tabel 4.8 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18.166	2.336		7.777	.000
X1	.371	.081	.423	4.573	.000
X2	.169	.064	.247	2.668	.009

a. Dependent Variable: Y
Sumber: Output SPSS 22 data diolah (2020).

Berdasarkan pada tabel 4.8 maka hasil uji regresi linear berganda di atas dengan menggunakan model persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

$PD = 18.166 + 0.371 PM + 0.169PM + e \dots\dots\dots(4.1)$

Intepretasi:

- 1) Konstanta sebesar 18.166 memiliki penjelasan bahwa jika variabel persepsi masyarakat (X1) dan partisipasi masyarakat (X2) nilainya adalah 0 maka tingkat pembangunan desa (Y) memiliki persentase sebesar 18.166 persen.
- 2) Koefisien regresi variabel persepsi masyarakat (X1) sebesar 0.371 memiliki penjelasan bahwa jika variabel bebas yang lain nilainya tetap maka variabel persepsi masyarakat (X1) kenaikan sebesar satu satuan maka tingkat pembangunan

desa (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0.371. Koefesien bernilai positif antara persepsi masyarakat (X1) artinya yaitu terjadi hubungan positif antara persepsi masyarakat (X1) dengan pembangunan desa (Y), maka semakin tinggi persepsi masyarakat (X1) maka semakin meningkat pembangunan desa (Y).

- 3) Koefisien regresi variabel partisipasi masyarakat (X2) sebesar 0.169 memiliki penjelasan bahwa jika variabel bebas yang lain nilainya tetap maka variabel partisipasi masyarakat (X2) kenaikan sebesar satu satuan, maka tingkat pembangunan desa (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0.169. Koefesien bernilai positif antara partisipasi masyarakat (X2) artinya yaitu terjadi hubungan positif antara partisipasi masyarakat (X2) dengan pembangunan desa (Y), maka semakin tinggi partisipasi masyarakat (X1) maka semakin meningkat pembangunan desa (Y)

4.7 Hasil Uji Hipotesis

4.7.1 Hasil Uji T (persial)

Tabel 4.9
Hasil Uji T (Parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18.166	2.336		7.777	.000
X1	.371	.081	.423	4.573	.000
X2	.169	.064	.247	2.668	.009

a. Dependent Variable: Y
Sumber: Output SPSS 22 data diolah (2020).

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa, t_{hitung} pada variable bebas yaitu persepsi masyarakat (X1) sebesar 4.573 dan partisipasi masyarakat (X2) sebesar 2.668. Di sini derajat bebas $(df) = n - k - 1 = 102 - 3 - 1 = 98$, maka didapatkan t_{tabel} sebesar 1,660. Berdasarkan hal tersebut maka:

- 1) Pada variabel persepsi masyarakat (X1) memiliki t_{hitung} sebesar 4.573, dengan nilai signifikan sebesar 0,000 berdasarkan keterangan tersebut maka t_{hitung} (sebesar 4.573) $> t_{tabel}$ (1,660). Maka jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak, artinya memiliki berpengaruh yang signifikan antara variabel persepsi masyarakat (X1), terhadap pembangunan desa (Y) di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.
- 2) Pada variabel partisipasi masyarakat (X2) memiliki t_{hitung} sebesar 2.668, dengan nilai signifikan sebesar 0,009 berdasarkan keterangan tersebut maka t_{hitung} (sebesar 2.668) $> t_{tabel}$ (1,660). Maka jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak, artinya memiliki berpengaruh yang signifikan antara variabel partisipasi masyarakat (X2), terhadap pembangunan desa (Y) di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

4.7.2 Hasil Uji F (Simultan)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Tabel 4.10
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	473.034	2	236.517	25.021	.000 ^b
Residual	935.838	99	9.453		
Total	1408.873	101			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Output SPSS 22 data diolah (2020).

Nilai F_{tabel} berdasarkan tingkat kesalahan 5% atau 0,05 dengan nilai df n_1 yaitu $k-1$ ($3-1$) = 2 dan df n_2 yaitu $n-k-1$ ($102-3-1$) = 98, F_{tabel} yang didapatkan adalah 3,09 . Maka Tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ yaitu $25.021 > 3.09$. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas yaitu persepsi masyarakat (X1) dan partisipasi masyarakat (X2), mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap pembangunan desa (Y) di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

4.7.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.11
Hasil Uji R Square
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.579 ^a	.336	.322	3.07456

a. Predictors: (Constant), X2, X1
Sumber: Output SPSS 22 data diolah (2020).

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa koefisien R dapat diperoleh hasil yaitu sebesar 0.579 yang artinya bahwa hubungan variabel dependen kuat. Koefisien R Square hasilnya sebesar 0.336 dan Adjusted R Square sebesar 0.322. Hal tersebut berarti 33% pembangunan desa yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu persepsi masyarakat dan partisipasi masyarakat, sedangkan 67% pembangunan desa di pengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.8 Pembahasan Hasil penelitian

4.8.1 Pengaruh Persepsi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa

Pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa variabel persepsi masyarakat (X1) memiliki t_{hitung} sebesar 4.573, dengan nilai signifikan sebesar 0,000 berdasarkan keterangan tersebut maka t_{hitung} (sebesar 4.573) > t_{tabel} (1,660). Maka jika t_{hitung} > t_{tabel} maka H_a diterima dan H_o ditolak, artinya memiliki berpengaruh yang signifikan antara variabel persepsi masyarakat (X1), terhadap pembangunan desa (Y) di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut yaitu persepsi

masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan hipotesis sebelumnya dimana persepsi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

Sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Isti, Komar, & Heryanto, 2017) yang mengatakan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara persepsi terhadap pemanfaatan dana desa. Persepsi merupakan aspek penting terhadap pemanfaatan dana desa, di mana dalam hal ini mencakup pemahaman dan pengetahuan individu masing-masing.

Pesepsi merupakan pengamatan. Pengamatan sangat berpengaruh besar terhadap pembangunan desa karena adanya pengamatan dari masyarakat maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk pembangunan desa di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu persepsi masyarakat sangat berpengaruh dalam pembangunan desa.

4.8.2 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa

Pada tabel 4.3 variabel partisipasi masyarakat (X_2) memiliki t_{hitung} sebesar 2.668, dengan nilai signifikan sebesar 0,009 berdasarkan keterangan tersebut maka t_{hitung} (sebesar 2.668) > t_{tabel} (1,660). Maka jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak, artinya memiliki berpengaruh yang signifikan antara variabel partisipasi masyarakat (X_2), terhadap pembangunan desa (Y) di

Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut yaitu partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan hipotesis sebelumnya dimana partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Arthur T. Lomboh (2014) yang mengemukakan bahwa dalam pembangunan desa tidak dapat berjalan dengan baik atau tidak berhasil jika hanya dilakukan oleh satu komponen saja, artinya dalam pembangunan desa bukan hanya menjadi tanggung jawab atau kewajiban pemerintah desa semata, tetapi juga menuntut keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat penting, secara umum partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan bersama.

Anggapan partisipasi ini berpengaruh karena dengan adanya partisipasi masyarakat yang besar terhadap pembangunan desa maka akan terstruktur kegiatan perumusan program dan manfaatnya, kemudian juga mekanisme pengelolaan pelaksanaan dapat dilakukan koordinasi dengan baik. Oleh karena itu sangat penting dan berpengaruh besar partisipasi masyarakat supaya pembangunan desa berjalan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan alokasi dana desa untuk pembangunan gampong di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya. Dari uraian di bab sebelumnya dapat disimplkan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel persepsi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa, karena semakin besarnya tingkat persepsi masyarakat maka semakin besar pula tingkat pembangunan desa.
- 2) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa, hal ini disebabkan karena semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat semakin besar pula tingkat pembangunan desa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan penulisan, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah provinsi Aceh agar lebih mengetahui lagi masalah-masalah yang mempengaruhi ADD terhadap pembangunan gampoeng di kabupaten Abdiya.

- 2) Pemerintah provinsi Aceh harus lebih meningkatkan pengelolaan ADD terhadap gampoeng di kabupaten Abdiya.
- 3) Pemerintah provinsi Aceh juga harus meningkatkan tentang pengetahuan para kepala desa serta pengurus gampoeng lainnya tentang penggunaan ADD.
- 4) Bagi pemerintah provinsi Aceh harus lebih meningkatkan upaya penggunaan ADD yang tepat terhadap pembangunan gampoeng.
- 5) Bagi pemerintah kabupaten Abdiya harus meningkatkan kesadaran masyarakat bagaimana pentingnya ADD terhadap pembangunan gampoeng serta pengaruhnya bagi pembangunan gampoeng.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M., & Darmiah. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 226-238.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan :Apa, Mengapa, dan Bagaimana. 1(1), 1-10.
- Annivelorita. (2015). Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunutan. *eJournal Administrasi Negara*, 3(5), 1712 – 1726.
- Ashari, N. (2013). Impelementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 1135-1144.
- Ash-shidiqq, E. A., & Wibi, H. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa. 4(1), 110-131.
- Aziz, A., & Humaizi. (2013). Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. 3(1), 1-15.
- Baihaqi. (2011). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 1(3), 246-266.
- Djiko, R., Arimawa, P. S., & Tangkau, C. H. (2018, Oktober). Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 101-111.
- Harahap, R. U. (2017, Januari-Juni). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten. /Kota Sumatera Utara. *KITABAH*, 1(1).
- Harefa, M. (2018, Desember). Hubungan Dana Bagi Hasil dengan Penerimaan Daerah dan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 9(2), 147 - 160.

- Hasman, R. (2015, November). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kinvaro Kabupaten Sigi. *e-Jurnal Katalogis*, 3(11), 107-117.
- Herlina, A., & Hermana, D. (2018). Pengaruh Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa terhadap Efektifitas Pembangunan Fisik di Desa Sukatani Kecamatan Cisirupan Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 9(2), 1-8.
- Hidayah, N., & Setiyawati, H. (2014, Januari). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Penapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung di Provisnis Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*, XVIII(1), 45-58.
- Isti, D. N., Komar, O., & Heryanto, N. (2017). Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 1(1), 52-62.
- Jayani, D. H. (2019, 8). databoks. (H. Widowati, Ed.) *Inilah Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada 2020*.
- John P, A. D. (2015, maret). implementasi Kebijakan Anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu kabupaten Ketapang. *Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 1-16.
- Karimah, F., Saleh,, C., & Wanusmawatie, I. (n.d.). Pengelolaan Alokasi dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. 2(4), 597-602|.
- Kholik, A. (2017, Desember). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sibolang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala*, 5(12), 99-101.
- Magdalena, B., Kusuma, A. R., & Utomo, H. S. (2013). Implementasi Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Tenggaraong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrative Reform*, 1(3), 605-616.
- Melis, Muthalib, A. A., & Apoda. (2016, April). Analisi Partisipasi Masyakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Wawolesea Kecamatan Laloso Kabupaten Konawe Utara. *Jurnal Ekonomi (JE)*, 1(1), 99-105.

- Muhtarom, A. (2015, Maret). Analisis PAD (pendapatan Asli Daerah) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015. *Jurnal EKBIS*, *XIII*(1), 659-667.
- Nisa, A. A. (2017). Analisis Pengaruh Pendatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan ekonomi Kabuptaen/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, *1*(2), 203-214.
- Permana, G. I. (2012, Juli-Desember). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, *1*(2), 214-231.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, *11*(1), 1-12.
- Ruru, N., Kalangi, L., & S. Budiarmo, N. (2017). Analisa Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *12*(1), 83-90.
- Sabdaningtyas, L. (2018, June). Model Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal pada Satuan Pendidikn Jenjang SD. *22*(1), 70-81.
- Safar, M. N. (2019). Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Deakade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, *2*(1), 30-45.
- Salindeho, C. (2016, September). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, *4*(3), 705-716.
- Sanusi, Paranoan, D., & Djumlani, A. (2014). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan . *eJournal Administrative Reform*, *2*(3), 1732-1745.
- Sofiyanto, M., Mardani, R. M., & Salim, M. A. (2017, Agustus). Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *Jurnal Riset Manajemen*, *6*(4), 28-38.

- Tahar, A., & Zakhiya, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12(1), 88-99.
- Tikollah, M. R., & A. Ngampo, M. Y. (2018, januari). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *I*(1), 87-96.
- Uli Simarmata, Y. M. (2015). mplementasi kebijakan pelarang dan pengahpusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi pekkerja anak di kota bandung.
- Wati , M. R., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 63-76.
- Yusriadi, S. M. (2017, September). Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah pada Provinsi Aceh. *Agregat: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 211-220.
- Zainudin, A., & Sutjiatmi, S. (2018, April). Pembangunan dan Mekanisme Sistem Perencanaan (Studi Kasus Desa Pengabean dan Desa Karanganyar). *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 3(1), Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Kuisisioner

I. Tujuan Kuisisioner Penelitian

Adapun penelitian ini saya Ade Qusrinda Mahasiswa UIN Ar-raniry sedang melakukan penelitian mengenai Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry. Atas kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

II. Karakteristik Responden

Nama :
Umur :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Pendidikan :

III. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Berilah tanda (√) pada salah satu kolom dalam tabel daftar kuisisioner penelitian sebagai penilaian anda terhadap pernyataan dalam kuisisioner dengan keterangan sebagai berikut:

STS : Sangat Tidak Setuju (1) , TS : Tidak Setuju (2) , N : Netral(3) , S: Setuju (4), SS : Sangat Setuju (5).

a. Persepsi Masyarakat Tentang Alokasi Dana Desa (ADD)

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Saya mengetahui tentang informasi pemberian Alokasi Dana Desa (ADD)					
2	Saya mengetahui besaran jumlah Alokasi Dana Desa (ADD)					
3	Saya merasakan manfaat dari Alokasi Dana Desa (ADD)					
4	Saya peduli dengan program kegiatan Alokasi Dana Desa					

5	Saya menyadari kepatuhan aturan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)					
6	Saya merasakan dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dari penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)					
7	Adanya Alokasi Dana Desa (ADD) membuat saya merasa lebih baik dan diuntungkan					
8	Menurut saya Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mengembangkan potensi dan kebutuhan <i>gampong</i>					
9	Selama ini implementasi program kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mengatasi permasalahan pembangunan <i>gampong</i>					

b. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Dari Program Alokasi Dana Desa (ADD)

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Saya mengikuti musyawarah gampong terkait dengan program Alokasi Dana Desa (ADD)					
2	Saya ikut serta memberikan ide, gagasan dan tanggapan dalam rapat Alokasi Dana Desa (ADD)					
3	Saya berpartisipasi dalam membuat proposal program kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan kebutuhan gampong					
4	Saya ikut melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan dari Alokasi Dana Desa (ADD)					
5	Saya ikut serta dalam					

	memberikan sumbangan tenaga atau materi dalam pelaksanaan kegiatan dari program penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)					
6	Saya ikut serta dalam memberikan sumbangan materi dalam pelaksanaan kegiatan dari program					
7	Saya ikut menilai hasil kegiatan dari program penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)					
8	Saya ikut serta dalam mengawasi dan melakukan pengaduan apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan dari program penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)					
9	Saya melakukan pemeliharaan terhadap hasil kegiatan dari program penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)					

c. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Pembangunan Gampong

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk perbaikan dan pembangunan sarana dan prasaran infrastruktur gampong					
2	Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana Masjid gampong					
3	Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk perbaikan lingkungan dan pemukiman masyarakat gampong					
4	Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah dan pelayanan Kesehatan					

5	Pemerintah Gampong memberikan modal usaha dengan memanfaatkan anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD)					
6	Pemerintah Gampong melakukan kegiatan pelatihan masyarakat dengan memanfaatkan anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD)					
7	Pemerintah Gampong menyediakan bahan-bahan alat produksi dengan memanfaatkan anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD)					
8	Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) meningkatkan ekonomi masyarakat					
9	Pemanfaatan Alokasi Dan Desa (ADD) Fokus dalam hal mensejahterakan masyarakat					

LAMPIRAN 2 Data Responden

Jenis Kelamin	Pekerjaan	x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1.6	x1.7	x1.8	x1.9
Lk	Pensiunan	4	3	4	5	4	5	4	4	4
Pr	PNS	4	3	4	5	4	5	4	4	4
Lk	Wiraswasta	2	2	4	4	4	4	3	4	4
Lk	Wiraswasta	4	3	4	5	4	5	4	4	4
Lk	Security	4	4	2	5	3	4	3	4	4
Lk	Mahasiswa	4	4	2	3	3	4	3	4	3
Lk	Wiraswasta	5	5	4	4	4	4	3	5	5
Lk	Petani	3	4	4	4	3	4	3	4	4
Lk	Wiraswasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lk	Mahasiswa	2	2	3	3	4	4	4	4	4
Lk	Mahasiswa	1	1	4	4	3	3	3	4	4
Lk	Wiraswasta	2	2	2	3	3	4	2	3	4
Lk	Petani	5	2	5	5	4	4	3	3	5
Lk	Nelayan	4	2	2	4	4	4	4	4	4
Pr	IRT	2	2	2	2	3	2	3	2	3
Pr	IRT	3	4	4	4	3	4	4	3	4
Pr	IRT	4	4	4	3	3	4	4	4	3
Pr	Wiraswasta	3	4	3	4	3	4	4	3	4
LK	Nelayan	3	4	4	4	3	4	3	4	4
Pr	IRT	4	4	4	4	3	4	4	3	4
Pr	IRT	3	4	4	3	3	4	4	3	4
Lk	Bengkel	4	4	1	4	2	4	2	4	4
Lk	Bengkel	4	4	1	4	2	4	2	4	2
Lk	Wiraswasta	5	5	4	3	3	4	3	4	3

Lk	Wiraswa sta	4	1	4	4	4	4	4	4	4
Lk	Petani	5	4	5	5	4	4	3	4	5
Pr	Mahasis wa	4	2	4	3	4	4	2	4	4
Pr	IRT	4	3	5	3	4	3	3	4	4
Lk	Wiraswa sta	3	2	3	4	3	3	3	4	2
Lk	Wiraswa sta	3	4	3	4	3	3	4	3	4
Pr	Wiraswa sta	3	4	3	3	3	3	2	3	3
Pr	IRT	4	3	4	4	4	3	4	4	3
Pr	IRT	4	4	3	4	4	4	3	4	2
Pr	Wiraswa sta	3	4	3	2	2	3	4	3	3
Pr	IRT	3	4	3	4	3	3	4	3	4
Pr	IRT	3	4	3	4	3	4	4	2	2
Pr	Wiraswa sta	4	4	4	4	2	4	3	4	3
Lk	PNS	4	4	4	4	4	3	4	2	3
Pr	IRT	4	4	4	4	4	3	4	2	3
Lk	Wiraswa sta	4	2	3	4	2	4	4	4	2
Lk	PNS	2	4	4	2	2	4	3	4	4
Lk	Wiraswa sta	4	4	4	4	4	4	4	4	3
Pr	IRT	4	3	4	4	4	3	4	4	2
Pr	Mahasis wa	3	2	3	4	3	4	2	4	3
Lk	Wiraswa sta	3	4	4	2	4	2	3	4	4
Pr	IRT	4	5	3	4	4	4	3	4	4
Lk	nelayan	3	4	5	4	4	5	5	4	3
Pr	IRT	4	5	3	3	4	4	2	5	4
Lk	Petani	4	3	5	3	5	3	3	2	3
Lk	Petani	3	4	3	4	4	5	3	4	3
Lk	Wiraswa	4	4	3	4	4	3	4	5	4

	sta									
Pr	Wiraswa sta	3	4	4	4	4	4	3	2	2
Pr	IRT	4	4	3	4	4	3	3	2	4
Lk	Petani	4	3	4	4	3	4	2	2	3
Pr	IRT	4	3	4	3	3	4	4	3	3
Pr	IRT	4	3	3	4	4	4	3	5	4
Lk	Mahasis wa	4	3	3	4	4	4	4	3	4
Lk	Wiraswa sta	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pr	Wiraswa sta	1	2	3	4	1	2	3	4	3
Pr	IRT	2	2	2	4	2	4	2	4	2
Pr	IRT	3	4	5	3	3	4	4	3	4
Pr	IRT	3	4	3	3	3	4	3	5	4
Pr	Wiraswa sta	3	4	3	4	3	4	4	3	4
Pr	Wiraswa sta	3	4	3	3	3	4	4	3	4
Lk	Wiraswa sta	4	2	2	3	4	2	4	4	4
Pr	Wiraswa sta	3	3	4	4	4	5	4	4	4
Lk	Wiraswa sta	4	4	4	3	4	4	4	4	2
Lk	Wiraswa sta	2	2	4		3	4	3	3	4
Lk	Nelayan	4	2	2	4	4	4	4	4	4
Lk	Wiraswa sta	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Lk	Wiraswa sta	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Lk	Wiraswa sta	2	2	4	3	3	4	2	3	4
Pr	IRT	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lk	Petani	2	2	2	2	5	3	2	3	2
Lk	Santri	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lk	Wiraswa	3	4	4	5	3	4	5	5	5

	sta									
Lk	Santri	4	3	4	5	4	5	5	5	5
Lk	Nelayan	5	4	4	5	3	4	5	5	4
Pr	IRT	3	4	4	4	3	4	3	4	4
Pr	IRT	4	2	2	2	4	2	2	3	4
Pr	IRT	4	2	2	2	3	4	4	4	4
Pr	Wiraswa sta	3	4	2	5	3	1	5	5	2
Pr	IRT	4	4	4	4	5	4	4	5	4
Lk	Wiraswa sta	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lk	Nelayan	2	4	4	3	2	4	3	4	4
Pr	Mahasis wa	3	4	4	4	3	4	4	3	4
Lk	Mahasis wa	2	2	2	2	2	3	4	3	2
Lk	Petani	3	4	3	4	3	4	4	4	3
Lk	Wiraswa sta	3	4	4	3	3	4	4	3	4
Pr	IRT	3	2	2	2	3	3	4	4	4
Lk	Petani	4	4	4	3	4	4	4	3	3
Lk	Petani	3	4	3	2	3	4	2	3	3
Lk	Nelayan	2	2	2	2	4	2	2	3	4
Pr	Wiraswa sta	3	2	4	4	3	4	4	3	4
Lk	Mahasis wa	3	3	3	3	4	3	4	4	3
Lk	Nelayan	2	2	2	4	2	2	3	4	2
Pr	IRT	2	4	4	3	2	4	3	4	4
Pr	IRT	2	2	2	4	2	2	3	4	2
Pr	Wiraswa sta	4	2	4	4	4	3	4	4	4
Pr	Wiraswa sta	2	4	4	3	2	4	3	4	4
Pr	IRT	2	2	2	2	5	3	2	3	2
Lk	Petani	1	1	4	4	3	3	3	4	4

Jenis Kelamin	Pekerjaan	x2. 1	x2. 2	x2. 3	x2. 4	x2. 5	x2. 6	x2. 7	x2. 8	x2. 9
Lk	Pensiunan	4	5	4	4	4	3	4	3	5
Pr	PNS	4	5	4	4	4	3	4	3	5
Lk	Wiraswasta	2	1	2	4	4	2	4	4	4
Lk	Wiraswasta	4	5	4	4	4	3	4	3	5
Lk	Security	4	3	4	4	4	3	3	4	4
Lk	Mahasiswa	1	3	1	5	1	5	5	5	5
Lk	Wiraswasta	4	5	3	3	4	4	3	4	4
Lk	Petani	4	3	4	4	3	4	3	4	3
Lk	Wiraswasta	3	3	2	2	3	2	4	3	3
Lk	Mahasiswa	2	2	2	2	2	2	2	3	3
Lk	Mahasiswa	2	2	3	3	2	2	2	2	3
Lk	Wiraswasta	2	2	2	2	3	3	2	2	3
Lk	Petani	4	3	3	2	5	4	1	4	2
Lk	Nelayan	2	2	2	3	2	2	4	3	4
Pr	IRT	4	4	3	4	4	4	4	1	2
Pr	IRT	4	3	4	4	4	4	3	3	4
Pr	IRT	3	4	3	4	4	3	3	4	4
Pr	Wiraswasta	3	4	3	4	3	4	4	3	4
LK	Nelayan	4	3	4	3	4	4	4	3	4
Pr	IRT	4	3	4	4	4	4	3	3	4
Pr	IRT	3	4	3	4	4	3	3	4	4
Lk	Bengkel	4	4	4	4	3	3	3	4	2
Lk	Bengkel	4	4	4	4	2	2	2	4	2
Lk	Wiraswasta	4	5	5	1	1	1	1	1	1
Lk	Wiraswasta	2	4	2	2	2	2	4	4	4

Lk	Petani	5	5	4	3	4	3	3	2	2
Pr	Mahasiswa	2	2	4	4	4	4	2	2	2
Pr	IRT	4	3	3	3	2	2	2	2	2
Lk	Wiraswasta	3	4	2	4	3	4	4	3	4
Lk	Wiraswasta	2	3	2	3	3	3	4	3	4
Pr	Wiraswasta	3	4	3	4	3	4	3	3	3
Pr	IRT	2	2	3	4	2	4	4	2	2
Pr	IRT	2	2	3	2	2	2	2	3	3
Pr	Wiraswasta	4	3	2	4	3	4	3	3	3
Pr	IRT	3	4	2	4	3	4	3	3	4
Pr	IRT	2	3	4	2	2	2	3	4	3
Pr	Wiraswasta	3	4	3	4	4	3	2	3	3
Lk	PNS	3	3	4	5	3	4	4	3	4
Pr	IRT	3	3	4	5	5	3	4	3	4
Lk	Wiraswasta	2	2	2	2	2	2	2	2	4
Lk	PNS	4	2	2	2	2	2	2	2	2
Lk	Wiraswasta	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Pr	IRT	2	2	3	4	2	4	2	3	4
Pr	Mahasiswa	4	2	4	2	3	4	4	4	3
Lk	Wiraswasta	2	2	2	2	4	2	3	2	2
Pr	IRT	4	2	3	3	5	3	4	4	3
Lk	nelayan	4	5	3	4	4	3	3	3	4
Pr	IRT	4	2	3	4	5	3	4	4	3
Lk	Petani	3	2	4	3	4	5	3	3	4
Lk	Petani	4	5	3	2	4	4	3	3	4
Lk	Wiraswasta	2	3	4	5	3	4	2	3	4
Pr	Wiraswasta	2	3	4	2	3	4	3	4	3

	sta									
Pr	IRT	2	2	3	4	2	2	2	3	4
Lk	Petani	4	2	2	3	4	3	4	2	4
Pr	IRT	4	3	3	4	3	3	4	3	3
Pr	IRT	4	2	3	3	5	3	3	3	3
Lk	Mahasiswa	5	3	4	4	3	4	3	3	3
Lk	Wiraswasta	4	3	3	3	4	4	5	4	4
Pr	Wiraswasta	1	3	2	3	2	3	2	2	3
Pr	IRT	4	2	4	2	4	2	2	4	2
Pr	IRT	3	4	3	4	3	4	3	4	3
Pr	IRT	3	3	4	3	3	4	3	3	4
Pr	Wiraswasta	3	4	3	5	3	4	4	3	4
Pr	Wiraswasta	4	4	3	4	3	3	4	3	3
Lk	Wiraswasta	4	4	1	5	4	4	1	4	4
Pr	Wiraswasta	3	3	3	4	3	3	4	3	2
Lk	Wiraswasta	2	2	2	2	2	3	3	4	4
Lk	Wiraswasta	4	1	1	1	1	1	1	3	1
Lk	Nelayan	2	2	2	3	2	2	4	3	4
Lk	Wiraswasta	3	2	2	2	2	2	2	2	2
Lk	Wiraswasta	3	2	2	2	2	2	2	2	2
Lk	Wiraswasta	2	2	2	3	3	3	2	2	2
Pr	IRT	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Lk	Petani	4	4	3	4	4	4	4	1	2
Lk	Santri	2	2	2	2	4	2	4	4	4
Lk	Wiraswasta	4	3	4	2	5	3	4	2	3
Lk	Santri	3	4	5	4	4	5	4	4	4

Lk	Nelayan	4	5	5	4	5	4	5	3	4
Pr	IRT	3	4	3	4	4	5	4	3	4
Pr	IRT	2	2	2	2	2	2	2	3	4
Pr	IRT	4	2	4	4	4	3	4	4	4
Pr	Wiraswa sta	2	5	3	5	5	1	1	2	5
Pr	IRT	5	4	4	5	4	4	5	4	4
Lk	Wiraswa sta	4	4	3	4	4	3	3	3	3
Lk	Nelayan	4	2	2	2	2	2	2	3	4
Pr	Mahasis wa	4	3	4	4	4	4	3	3	4
Lk	Mahasis wa	4	3	3	4	3	4	3	3	4
Lk	Petani	4	3	4	3	4	4	4	3	4
Lk	Wiraswa sta	3	4	3	4	4	3	4	3	4
Pr	IRT	3	4	4	3	4	4	3	4	3
Lk	Petani	4	4	3	4	3	4	4	4	3
Lk	Petani	3	2	4	4	3	4	4	3	4
Lk	Nelayan	2	2	2	2	2	2	2	3	4
Pr	Wiraswa sta	3	4	4	4	3	3	4	3	4
Lk	Mahasis wa	4	4	3	4	3	3	4	3	4
Lk	Nelayan	2	2	2	2	2	2	3	4	4
Pr	IRT	4	2	2	2	2	2	2	3	4
Pr	IRT	2	2	2	2	2	2	3	4	4
Pr	Wiraswa sta	3	5	5	4	5	5	3	5	5

Jenis Kelamin	Pekerjaa n	y1. 1	y1. 2	y1. 3	y1. 4	y. 5	y1. 6	y1. 7	y1. 8	y1. 9
Lk	Pensiuna n	5	5	5	3	3	4	3	5	5
Pr	PNS	5	5	5	4	4	5	4	5	5
Lk	Wiraswa sta	4	4	4	2	2	4	4	2	4

Lk	Wiraswa sta	5	5	5	4	4	5	4	5	5
Lk	Security	3	4	3	3	4	3	3	4	3
Lk	Mahasis wa	1	1	1	3	1	1	1	1	4
Lk	Wiraswa sta	5	5	5	5	3	5	4	4	5
Lk	Petani	4	3	4	4	3	4	3	4	4
Lk	Wiraswa sta	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lk	Mahasis wa	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lk	Mahasis wa	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lk	Wiraswa sta	4	4	4	4	3	3	2	3	2
Lk	Petani	5	3	4	2	5	3	4	5	4
Lk	Nelayan	4	4	4	4	2	4	4	4	4
Pr	IRT	3	4	3	4	3	4	3	4	2
Pr	IRT	4	3	4	4	4	3	4	5	5
Pr	IRT	4	3	3	4	3	4	3	3	3
Pr	Wiraswa sta	3	4	4	4	4	3	3	4	5
LK	Nelayan	3	4	4	4	3	4	4	4	4
Pr	IRT	4	3	4	4	4	3	4	5	5
Pr	IRT	3	4	3	4	3	4	3	4	4
Lk	Bengkel	4	4	4	4	2	4	4	4	4
Lk	Bengkel	4	4	4	4	2	4	4	4	4
Lk	Wiraswa sta	4	4	4	5	4	3	2	4	4
Lk	Wiraswa sta	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lk	Petani	4	5	5	5	4	4	5	5	4
Pr	Mahasis wa	3	5	5	5	4	4	5	5	5
Pr	IRT	4	5	5	5	4	4	5	5	5
Lk	Wiraswa sta	3	4	4	3	4	4	3	3	4

Lk	Wiraswa sta	3	4	4	4	3	4	3	4	4
Pr	Wiraswa sta	4	3	4	3	3	4	3	4	3
Pr	IRT	3	4	3	4	3	4	2	3	3
Pr	IRT	4	3	4	4	3	4	3	4	4
Pr	Wiraswa sta	4	3	4	3	2	4	3	4	4
Pr	IRT	3	4	3	5	3	5	3	5	4
Pr	IRT	4	3	4	2	5	3	4	3	3
Pr	Wiraswa sta	4	4	3	3	3	4	4	4	4
Lk	PNS	4	5	5	5	4	4	4	4	4
Pr	IRT	3	4	3	5	5	5	4	4	4
Lk	Wiraswa sta	4	3	4	3	3	3	3	4	4
Lk	PNS	3	4	3	4	4	4	4	3	3
Lk	Wiraswa sta	4	3	3	4	4	3	4	3	3
Pr	IRT	3	4	4	3	2	4	3	4	3
Pr	Mahasis wa	4	3	4	3	2	4	4	3	4
Lk	Wiraswa sta	4	3	4	3	4	4	4	3	3
Pr	IRT	5	5	4	4	3	4	3	4	5
Lk	nelayan	5	4	4	5	3	3	4	5	4
Pr	IRT	5	5	4	4	3	3	4	4	4
Lk	Petani	5	4	5	2	3	3	2	4	3
Lk	Petani	3	5	5	4	3	4	5	5	2
Lk	Wiraswa sta	3	5	3	4	2	4	3	5	3
Pr	Wiraswa sta	4	5	4	3	5	3	4	4	3
Pr	IRT	4	3	4	5	2	4	3	4	5
Lk	Petani	3	5	5	3	4	3	4	3	2
Pr	IRT	4	5	4	3	2	4	3	3	5
Pr	IRT	5	5	4	4	2	4	3	4	5

	sta									
Pr	IRT	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lk	Wiraswa sta	4	4	4	4	4	4	4	4	3
Lk	Nelayan	3	4	4	4	4	4	3	3	3
Pr	Mahasis wa	4	3	4	4	4	3	4	5	5
Lk	Mahasis wa	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lk	Petani	4	4	3	4	3	4	4	3	5
Lk	Wiraswa sta	3	4	3	4	3	4	4	4	5
Pr	IRT	4	4	3	4	2	4	3	3	3
Lk	Petani	4	4	4	3	4	3	4	4	3
Lk	Petani	3	4	2	4	3	4	4	3	4
Lk	Nelayan	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pr	Wiraswa sta	3	4	4	4	3	2	4	4	4
Lk	Mahasis wa	3	4	3	4	3	4	4	4	4
Lk	Nelayan	4	4	4	4	4	4	4	4	s
Pr	IRT	3	4	4	4	4	4	3	3	3
Pr	IRT	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pr	Wiraswa sta	5	5	5	4	4	5	5	4	5

LAMPIRAN 3 Hasil Uji

1. Hasil Uji Persepsi Masyarakat

Correlations

Correlations										
	X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X1. 5	X1. 6	X1. 7	X1. 8	X1. 9	X1
X1. 1 Pearson Correlati on Sig. (2- tailed) N	1	.412** .000 102	.221* .025 102	.353** .000 101	.429** .000 102	.307** .002 102	.268** .007 102	.181 .069 102	.198* .046 102	.698** .000 102
X1. 2 Pearson Correlati on Sig. (2- tailed) N	.412** .000 102	1 .000 102	.252* .011 102	.148 .140 101	.002 .983 102	.303** .002 102	.193 .053 102	.097 .331 102	.110 .272 102	.549** .000 102
X1. 3 Pearson Correlati on Sig. (2- tailed) N	.221* .025 102	.252* .011 102	1 .007 102	.265** .011 101	.250* .000 102	.375** .002 102	.297** .002 102	-.009 .930 102	.347** .000 102	.602** .000 102
X1. 4 Pearson Correlati on Sig. (2- tailed) N	.353** .000 101	.148 .140 101	.265** .007 101	1 .426 101	.080 .001 101	.334** .000 101	.356** .000 101	.293** .003 101	.189 .059 101	.597** .000 101
X1. 5 Pearson Correlati on Sig. (2- tailed) N	.429** .000 102	.002 .983 102	.250* .011 102	.080 .426 101	1 .298 102	.104 .201 102	.128 .201 102	.006 .954 102	.175 .078 102	.430** .000 102
X1. 6 Pearson Correlati on Sig. (2- tailed)	.307** .002	.303** .002	.375** .000	.334** .001	.104 .298	1 .126	.152 .089	.169 .089	.309** .002	.597** .000

X2 .2	Pearson Correlat ion Sig. (2- tailed) N	.328 ** .001 102	1 .420 ** .000 102	.432 ** .000 102	.369 ** .000 102	.387 ** .000 102	.229 * .021 102	.142 .155 102	.271 ** .006 102	.66 5** .00 0 102
X2 .3	Pearson Correlat ion Sig. (2- tailed) N	.331 ** .001 102	.420 ** .000 102	1 .327 ** .001 102	.412 ** .000 102	.472 ** .000 102	.243 * .014 102	.165 .098 102	.126 .207 102	.63 5** .00 0 102
X2 .4	Pearson Correlat ion Sig. (2- tailed) N	.205 * .039 102	.432 ** .000 102	.327 ** .001 102	1 .345 ** .000 102	.494 ** .000 102	.221 * .026 102	.111 .267 102	.276 ** .005 102	.62 7** .00 0 102
X2 .5	Pearson Correlat ion Sig. (2- tailed) N	.326 ** .001 102	.369 ** .000 102	.412 ** .000 102	.345 ** .000 102	1 .506 ** .000 102	.355 ** .000 102	.296 ** .003 102	.274 ** .005 102	.71 7** .00 0 102
X2 .6	Pearson Correlat ion Sig. (2- tailed) N	.312 ** .001 102	.387 ** .000 102	.472 ** .000 102	.494 ** .000 102	.506 ** .000 102	1 .359 ** .000 102	.283 ** .004 102	.373 ** .000 102	.76 5** .00 0 102
X2 .7	Pearson Correlat ion Sig. (2- tailed) N	.153 .124 102	.229 * .021 102	.243 * .014 102	.221 * .026 102	.355 ** .000 102	.359 ** .000 102	1 .195 * .050 102	.304 ** .002 102	.55 4** .00 0 102
X2 .8	Pearson Correlat ion Sig. (2- tailed) N	.150 .132 102	.142 .155 102	.165 .098 102	.111 .267 102	.296 ** .003 102	.283 ** .004 102	.195 * .050 102	1 .355 ** .000 102	.47 7** .00 0 102

X2.9	Pearson Correlation	-.029	.271**	.126	.276**	.274**	.373**	.304**	.355**	1	.534**
	Sig. (2-tailed)	.770	.006	.207	.005	.005	.000	.002	.000		.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
X2	Pearson Correlation	.504**	.665**	.635**	.627**	.717**	.765**	.554**	.477**	.534**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Uji Validitas Pembangunan Desa

Correlations

Correlations

	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y
Y.1	1	.303**	.334**	-.019	-.027	.167	.081	.314**	.261**	.483**
		.002	.001	.846	.791	.094	.421	.001	.008	.000
	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Y.2	.303**	1	.319**	.282**	.010	.326**	.314**	.315**	.128	.590**
	.002		.001	.004	.923	.001	.001	.001	.198	.000
	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Y.3	.334**	.319**	1	.245*	.060	.099	.376**	.498**	.240*	.650**
	.001	.001		.013	.551	.321	.000	.000	.015	.000
	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Y.4	-.019	.282**	.245*	1	.033	.218*	.274**	.410**	.374**	.583**
	.846	.004	.013		.741	.028	.005	.000	.000	.000

N	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Y. Pearson 5 Correlati on Sig. (2- tailed) N	-.027 .791 102	.010 .923 102	.060 .551 102	.033 .741 102	1 .056 102	-.190 .032 102	.212* .489 102	.069 .336 102	-.096 .020 102	.229* .020 102
Y. Pearson 6 Correlati on Sig. (2- tailed) N	.167 .094 102	.326** .001 102	.099 .321 102	.218* .028 102	-.190 .056 102	1 .127 102	.152 .526 102	.063 .096 102	.166 .000 102	.382** .000 102
Y. Pearson 7 Correlati on Sig. (2- tailed) N	.081 .421 102	.314** .001 102	.376** .000 102	.274** .005 102	.212* .032 102	.152 .127 102	1 .000 102	.478** .018 102	.235* .000 102	.639** .000 102
Y. Pearson 8 Correlati on Sig. (2- tailed) N	.314** .001 102	.315** .001 102	.498** .000 102	.410** .000 102	.069 .489 102	.063 .526 102	.478** .000 102	1 .000 102	.372** .000 102	.731** .000 102
Y. Pearson 9 Correlati on Sig. (2- tailed) N	.261** .008 102	.128 .198 102	.240* .015 102	.374** .000 102	-.096 .336 102	.166 .096 102	.235* .018 102	.372** .000 102	1 .000 102	.582** .000 102
Y Pearson Correlati on Sig. (2- tailed) N	.483** .000 102	.590** .000 102	.650** .000 102	.583** .000 102	.229* .020 102	.382** .000 102	.639** .000 102	.731** .000 102	.582** .000 102	1 .000 102

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

1. Uji reliabilitas Persepsi Masyarakat

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	101	99.0
	Excluded ^a	1	1.0
	Total	102	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.733	10

2. Uji Reliabilitas Pasrtisipasi Masyarakat

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	102	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	102	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.751	10

3. Uji Reliabilitas Pembangunan Desa

Case Processing Summary

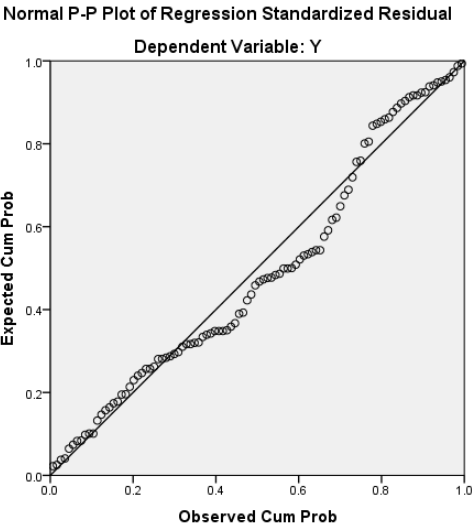
		N	%
Cases	Valid	102	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	102	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.728	10

Uji Normalitas



Hasil Uji Regresion

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 ^b		Enter

- a. Dependent Variable: Y
- b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.579 ^a	.336	.322	3.07456

- a. Predictors: (Constant), X2, X1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	473.034	2	236.517	25.021	.000 ^b
	Residual	935.838	99	9.453		
	Total	1408.873	101			

- a. Dependent Variable: Y
- b. Predictors: (Constant), X2, X1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18.166	2.336		7.777	.000
X1	.371	.081	.423	4.573	.000
X2	.169	.064	.247	2.668	.009

a. Dependent Variable: Y

LAMPIRAN 4 Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 100)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940

20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127

42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471

64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890

86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17549

LAMPIRAN 5 Tabel F

df untuk penye- but (N2)	df untukpem- bilang (N1)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242
2	18.51	19. 00	19. 16	19. 25	19. 30	19. 33	19. 35	19. 37	19. 38	19. 40
3	10.13	9.5 5	9.2 8	9.1 2	9.0 1	8.9 4	8.8 9	8.8 5	8.8 1	8.7 9
4	7.71	6.9 4	6.5 9	6.3 9	6.2 6	6.1 6	6.0 9	6.0 4	6.0 0	5.9 6
5	6.61	5.7 9	5.4 1	5.1 9	5.0 5	4.9 5	4.8 8	4.8 2	4.7 7	4.7 4
6	5.99	5.1 4	4.7 6	4.5 3	4.3 9	4.2 8	4.2 1	4.1 5	4.1 0	4.0 6
7	5.59	4.7 4	4.3 5	4.1 2	3.9 7	3.8 7	3.7 9	3.7 3	3.6 8	3.6 4
8	5.32	4.4 6	4.0 7	3.8 4	3.6 9	3.5 8	3.5 0	3.4 4	3.3 9	3.3 5
9	5.12	4.2 6	3.8 6	3.6 3	3.4 8	3.3 7	3.2 9	3.2 3	3.1 8	3.1 4
10	4.96	4.1 0	3.7 1	3.4 8	3.3 3	3.2 2	3.1 4	3.0 7	3.0 2	2.9 8
11	4.84	3.9 8	3.5 9	3.3 6	3.2 0	3.0 9	3.0 1	2.9 5	2.9 0	2.8 5
12	4.75	3.8 9	3.4 9	3.2 6	3.1 1	3.0 0	2.9 1	2.8 5	2.8 0	2.7 5
13	4.67	3.8 1	3.4 1	3.1 8	3.0 3	2.9 2	2.8 3	2.7 7	2.7 1	2.6 7
14	4.60	3.7 4	3.3 4	3.1 1	2.9 6	2.8 5	2.7 6	2.7 0	2.6 5	2.6 0
15	4.54	3.6 8	3.2 9	3.0 6	2.9 0	2.7 9	2.7 1	2.6 4	2.5 9	2.5 4
16	4.49	3.6 3	3.2 4	3.0 1	2.8 5	2.7 4	2.6 6	2.5 9	2.5 4	2.4 9
17	4.45	3.5 9	3.2 0	2.9 6	2.8 1	2.7 0	2.6 1	2.5 5	2.4 9	2.4 5
18	4.41	3.5 5	3.1 6	2.9 3	2.7 7	2.6 6	2.5 8	2.5 1	2.4 6	2.4 1

19	4.38	3.5 2	3.1 3	2.9 0	2.7 4	2.6 3	2.5 4	2.4 8	2.4 2	2.3 8
20	4.35	3.4 9	3.1 0	2.8 7	2.7 1	2.6 0	2.5 1	2.4 5	2.3 9	2.3 5
21	4.32	3.4 7	3.0 7	2.8 4	2.6 8	2.5 7	2.4 9	2.4 2	2.3 7	2.3 2
22	4.30	3.4 4	3.0 5	2.8 2	2.6 6	2.5 5	2.4 6	2.4 0	2.3 4	2.3 0
23	4.28	3.4 2	3.0 3	2.8 0	2.6 4	2.5 3	2.4 4	2.3 7	2.3 2	2.2 7
24	4.26	3.4 0	3.0 1	2.7 8	2.6 2	2.5 1	2.4 2	2.3 6	2.3 0	2.2 5
25	4.24	3.3 9	2.9 9	2.7 6	2.6 0	2.4 9	2.4 0	2.3 4	2.2 8	2.2 4
26	4.23	3.3 7	2.9 8	2.7 4	2.5 9	2.4 7	2.3 9	2.3 2	2.2 7	2.2 2
27	4.21	3.3 5	2.9 6	2.7 3	2.5 7	2.4 6	2.3 7	2.3 1	2.2 5	2.2 0
28	4.20	3.3 4	2.9 5	2.7 1	2.5 6	2.4 5	2.3 6	2.2 9	2.2 4	2.1 9
29	4.18	3.3 3	2.9 3	2.7 0	2.5 5	2.4 3	2.3 5	2.2 8	2.2 2	2.1 8
30	4.17	3.3 2	2.9 2	2.6 9	2.5 3	2.4 2	2.3 3	2.2 7	2.2 1	2.1 6
31	4.16	3.3 0	2.9 1	2.6 8	2.5 2	2.4 1	2.3 2	2.2 5	2.2 0	2.1 5
32	4.15	3.2 9	2.9 0	2.6 7	2.5 1	2.4 0	2.3 1	2.2 4	2.1 9	2.1 4
33	4.14	3.2 8	2.8 9	2.6 6	2.5 0	2.3 9	2.3 0	2.2 3	2.1 8	2.1 3
34	4.13	3.2 8	2.8 8	2.6 5	2.4 9	2.3 8	2.2 9	2.2 3	2.1 7	2.1 2
35	4.12	3.2 7	2.8 7	2.6 4	2.4 9	2.3 7	2.2 9	2.2 2	2.1 6	2.1 1
36	4.11	3.2 6	2.8 7	2.6 3	2.4 8	2.3 6	2.2 8	2.2 1	2.1 5	2.1 1
37	4.11	3.2 5	2.8 6	2.6 3	2.4 7	2.3 6	2.2 7	2.2 0	2.1 4	2.1 0
38	4.10	3.2 4	2.8 5	2.6 2	2.4 6	2.3 5	2.2 6	2.1 9	2.1 4	2.0 9
39	4.09	3.2 4	2.8 5	2.6 1	2.4 6	2.3 4	2.2 6	2.1 9	2.1 3	2.0 8
40	4.08	3.2 3	2.8 4	2.6 1	2.4 5	2.3 4	2.2 5	2.1 8	2.1 2	2.0 8

41	4.08	3.2 3	2.8 3	2.6 0	2.4 4	2.3 3	2.2 4	2.1 7	2.1 2	2.0 7
42	4.07	3.2 2	2.8 3	2.5 9	2.4 4	2.3 2	2.2 4	2.1 7	2.1 1	2.0 6
43	4.07	3.2 1	2.8 2	2.5 9	2.4 3	2.3 2	2.2 3	2.1 6	2.1 1	2.0 6
44	4.06	3.2 1	2.8 2	2.5 8	2.4 3	2.3 1	2.2 3	2.1 6	2.1 0	2.0 5
45	4.06	3.2 0	2.8 1	2.5 8	2.4 2	2.3 1	2.2 2	2.1 5	2.1 0	2.0 5
46	4.05	3.2 0	2.8 1	2.5 7	2.4 2	2.3 0	2.2 2	2.1 5	2.0 9	2.0 4
47	4.05	3.2 0	2.8 0	2.5 7	2.4 1	2.3 0	2.2 1	2.1 4	2.0 9	2.0 4
48	4.04	3.1 9	2.8 0	2.5 7	2.4 1	2.2 9	2.2 1	2.1 4	2.0 8	2.0 3
49	4.04	3.1 9	2.7 9	2.5 6	2.4 0	2.2 9	2.2 0	2.1 3	2.0 8	2.0 3
50	4.03	3.1 8	2.7 9	2.5 6	2.4 0	2.2 9	2.2 0	2.1 3	2.0 7	2.0 3
51	4.03	3.1 8	2.7 9	2.5 5	2.4 0	2.2 8	2.2 0	2.1 3	2.0 7	2.0 2
52	4.03	3.1 8	2.7 8	2.5 5	2.3 9	2.2 8	2.1 9	2.1 2	2.0 7	2.0 2
53	4.02	3.1 7	2.7 8	2.5 5	2.3 9	2.2 8	2.1 9	2.1 2	2.0 6	2.0 1
54	4.02	3.1 7	2.7 8	2.5 4	2.3 9	2.2 7	2.1 8	2.1 2	2.0 6	2.0 1
55	4.02	3.1 6	2.7 7	2.5 4	2.3 8	2.2 7	2.1 8	2.1 1	2.0 6	2.0 1
56	4.01	3.1 6	2.7 7	2.5 4	2.3 8	2.2 7	2.1 8	2.1 1	2.0 5	2.0 0
57	4.01	3.1 6	2.7 7	2.5 3	2.3 8	2.2 6	2.1 8	2.1 1	2.0 5	2.0 0
58	4.01	3.1 6	2.7 6	2.5 3	2.3 7	2.2 6	2.1 7	2.1 0	2.0 5	2.0 0
59	4.00	3.1 5	2.7 6	2.5 3	2.3 7	2.2 6	2.1 7	2.1 0	2.0 4	2.0 0
60	4.00	3.1 5	2.7 6	2.5 3	2.3 7	2.2 5	2.1 7	2.1 0	2.0 4	1.9 9
61	4.00	3.1 5	2.7 6	2.5 2	2.3 7	2.2 5	2.1 6	2.0 9	2.0 4	1.9 9
62	4.00	3.1 5	2.7 5	2.5 2	2.3 6	2.2 5	2.1 6	2.0 9	2.0 3	1.9 9

63	3.99	3.1 4	2.7 5	2.5 2	2.3 6	2.2 5	2.1 6	2.0 9	2.0 3	1.9 8
64	3.99	3.1 4	2.7 5	2.5 2	2.3 6	2.2 4	2.1 6	2.0 9	2.0 3	1.9 8
65	3.99	3.1 4	2.7 5	2.5 1	2.3 6	2.2 4	2.1 5	2.0 8	2.0 3	1.9 8
66	3.99	3.1 4	2.7 4	2.5 1	2.3 5	2.2 4	2.1 5	2.0 8	2.0 3	1.9 8
67	3.98	3.1 3	2.7 4	2.5 1	2.3 5	2.2 4	2.1 5	2.0 8	2.0 2	1.9 8
68	3.98	3.1 3	2.7 4	2.5 1	2.3 5	2.2 4	2.1 5	2.0 8	2.0 2	1.9 7
69	3.98	3.1 3	2.7 4	2.5 0	2.3 5	2.2 3	2.1 5	2.0 8	2.0 2	1.9 7
70	3.98	3.1 3	2.7 4	2.5 0	2.3 5	2.2 3	2.1 4	2.0 7	2.0 2	1.9 7
71	3.98	3.1 3	2.7 3	2.5 0	2.3 4	2.2 3	2.1 4	2.0 7	2.0 1	1.9 7
72	3.97	3.1 2	2.7 3	2.5 0	2.3 4	2.2 3	2.1 4	2.0 7	2.0 1	1.9 6
73	3.97	3.1 2	2.7 3	2.5 0	2.3 4	2.2 3	2.1 4	2.0 7	2.0 1	1.9 6
74	3.97	3.1 2	2.7 3	2.5 0	2.3 4	2.2 2	2.1 4	2.0 7	2.0 1	1.9 6
75	3.97	3.1 2	2.7 3	2.4 9	2.3 4	2.2 2	2.1 3	2.0 6	2.0 1	1.9 6
76	3.97	3.1 2	2.7 2	2.4 9	2.3 3	2.2 2	2.1 3	2.0 6	2.0 1	1.9 6
77	3.97	3.1 2	2.7 2	2.4 9	2.3 3	2.2 2	2.1 3	2.0 6	2.0 0	1.9 6
78	3.96	3.1 1	2.7 2	2.4 9	2.3 3	2.2 2	2.1 3	2.0 6	2.0 0	1.9 5
79	3.96	3.1 1	2.7 2	2.4 9	2.3 3	2.2 2	2.1 3	2.0 6	2.0 0	1.9 5
80	3.96	3.1 1	2.7 2	2.4 9	2.3 3	2.2 1	2.1 3	2.0 6	2.0 0	1.9 5
81	3.96	3.1 1	2.7 2	2.4 8	2.3 3	2.2 1	2.1 2	2.0 5	2.0 0	1.9 5
82	3.96	3.1 1	2.7 2	2.4 8	2.3 3	2.2 1	2.1 2	2.0 5	2.0 0	1.9 5
83	3.96	3.1 1	2.7 1	2.4 8	2.3 2	2.2 1	2.1 2	2.0 5	1.9 9	1.9 5
84	3.95	3.1 1	2.7 1	2.4 8	2.3 2	2.2 1	2.1 2	2.0 5	1.9 9	1.9 5

85	3.95	3.1 0	2.7 1	2.4 8	2.3 2	2.2 1	2.1 2	2.0 5	1.9 9	1.9 4
86	3.95	3.1 0	2.7 1	2.4 8	2.3 2	2.2 1	2.1 2	2.0 5	1.9 9	1.9 4
87	3.95	3.1 0	2.7 1	2.4 8	2.3 2	2.2 0	2.1 2	2.0 5	1.9 9	1.9 4
88	3.95	3.1 0	2.7 1	2.4 8	2.3 2	2.2 0	2.1 2	2.0 5	1.9 9	1.9 4
89	3.95	3.1 0	2.7 1	2.4 7	2.3 2	2.2 0	2.1 1	2.0 4	1.9 9	1.9 4
90	3.95	3.1 0	2.7 1	2.4 7	2.3 2	2.2 0	2.1 1	2.0 4	1.9 9	1.9 4
91	3.95	3.1 0	2.7 0	2.4 7	2.3 1	2.2 0	2.1 1	2.0 4	1.9 8	1.9 4
92	3.94	3.1 0	2.7 0	2.4 7	2.3 1	2.2 0	2.1 1	2.0 4	1.9 8	1.9 4
93	3.94	3.0 9	2.7 0	2.4 7	2.3 1	2.2 0	2.1 1	2.0 4	1.9 8	1.9 3
94	3.94	3.0 9	2.7 0	2.4 7	2.3 1	2.2 0	2.1 1	2.0 4	1.9 8	1.9 3
95	3.94	3.0 9	2.7 0	2.4 7	2.3 1	2.2 0	2.1 1	2.0 4	1.9 8	1.9 3
96	3.94	3.0 9	2.7 0	2.4 7	2.3 1	2.1 9	2.1 1	2.0 4	1.9 8	1.9 3
97	3.94	3.0 9	2.7 0	2.4 7	2.3 1	2.1 9	2.1 1	2.0 4	1.9 8	1.9 3
98	3.94	3.0 9	2.7 0	2.4 6	2.3 1	2.1 9	2.1 0	2.0 3	1.9 8	1.9 3

LAMPIRAN 6 Tabel R

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932

18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189
36	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066
38	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.5007
39	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950

40	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
41	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
46	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
47	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
48	0.2353	0.2787	0.3281	0.3610	0.4514
49	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
50	0.2306	0.2732	0.3218	0.3542	0.4432
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048

62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507

84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

BIODATA

Nama : Ade Qusrinda
 Tempat/tgl. Lahir : Pante Cermin, 11 Oktober 1997
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Status : Belum Kawin
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Alamat Rumah : Jl. Chik di Pineung III, Gampong Pineung,
 Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh.
 Email : adequsrinda@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

2003-2009 : SD Negeri Ladang Tuha I
 2009-2012 : MTs Negeri Manggeng
 2012-2015 : MA Negeri Blang Pidie
 2015-2020 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh